



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
INSPEKTORAT**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023 yang merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat Kabupaten Purworejo dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik/Instansi kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Inspektorat Kabupaten Purworejo. Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya serta acuan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Dasar Hukum	2
D. Profil Organisasi	4
E. Isu Strategis.....	16
F. Sistematika Penyusunan LKjIP	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	22
A. Perencanaan Kinerja	22
B. Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
A. Capaian Kinerja Inspektorat	33
B. Realisasi Anggaran Inspektorat.....	81
PENUTUP	97
Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Referensi;
2. Keputusan Inspektur Nomor 100.3.3.5/04/2024 Tanggal 8 Januari 2024 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Purworejo;
3. Keputusan Inspektur Nomor 100.3.3.5/22/2024 Tanggal 31 Januari 2024 tentang Tim Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
4. Keputusan Inspektur Nomor 100.3.3.5/23/2024 Tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
5. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023;
6. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023;
7. Laporan Realisasi Anggaran *print out by* FMIS;
8. Laporan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
9. Keputusan Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 160.18/17/2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.
10. Dokumen Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023;
11. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Desember Tahun 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya beban penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dari waktu ke waktu bersamaan dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai dengan dinamika perubahan yang terus berlangsung dengan sendirinya juga memberi konsekuensi pada peningkatan kebutuhan belanja pemerintah. Dalam kondisi keterbatasan potensi sumberdaya yang dimiliki daerah seperti Kabupaten Purworejo maka tantangan yang dihadapi menjadi semakin terasa berat.

Sementara itu seiring dengan meningkatnya wawasan dan kesadaran politik masyarakat bersamaan dengan proses globalisasi dan demokratisasi, maka tuntutan akan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) semakin mengemuka. Untuk dapat menyesuaikan dengan berbagai perubahan dalam masyarakat dan lingkungan nasional maupun internasional yang begitu cepat, maka menjadi keharusan bagi daerah untuk semakin meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan agar dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik serta tuntutan perubahan dalam masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar Pemerintah senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*. LKjIP Inspektorat Kabupaten Purworejo ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Kabupaten

Purworejo sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Purworejo dan Renstra Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Inspektorat Kabupaten Purworejo adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yaitu Bupati Purworejo atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kinerja.

C. Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

- Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 10 Seri A Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 9 Seri A Nomor 2);
 12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 66 Seri E Nomor 62);
 13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 29 Seri A Nomor 29);
 14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 103);

15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Seri A Nomor 4);
16. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/1/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

D. PROFIL ORGANISASI

1. Budaya Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Inspektorat Kabupaten Purworejo sebagai sebuah organisasi memiliki budaya organisasi yang dijalankan. Budaya organisasi yaitu sistem nilai bersama dalam suatu organisasi yang menjadi acuan bagaimana para pegawai melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan atau cita-cita organisasi. Budaya organisasi ini selanjutnya diwujudkan dalam Budaya Kerja yaitu sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari.

a. Maksud Budaya Kerja

Budaya kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalian, perumusan dan penerapan Nilai Budaya Kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen, dan kontinyu dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Tujuan Budaya Kerja

Tujuan Budaya kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Meneguhkan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi;
- 3) Mendorong peningkatan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya;
- 4) Memperkuat corak pemerintahan daerah bersendikan karakter budaya lokal.

c. Manfaat Budaya Kerja

Budaya kerja bagi PNS adalah memberikan kesempatan untuk berperan, berprestasi, aktualisasi diri, mendapat pengakuan, penghargaan, kebanggaan kerja, rasa ikut memiliki dan bertanggungjawab, memperluas wawasan serta meningkatkan kemampuan memimpin dan memecahkan masalah.

Manfaat budaya kerja bagi Inspektorat Kabupaten Purworejo sebagai sebuah instansi adalah:

- 1) Meningkatkan kerja sama antar individu, antar kelompok dan antar unit kerja;
- 2) Meningkatkan koordinasi sebagai akibat adanya kerja sama yang baik antar individu, antar kelompok dan antar unit kerja;
- 3) Mengefektifkan integrasi, sinkronisasi, keselarasan dan dinamika yang terjadi dalam organisasi;
- 4) Memperlancar komunikasi dan hubungan kerja;
- 5) Menumbuhkan kepemimpinan yang partisipatif;
- 6) Mengeliminasi hambatan-hambatan psikologis dan kultural;
- 7) Menciptakan suasana kerja yang menyenangkan sehingga dapat mendorong kreativitas pegawai.

Manfaat budaya kerja bagi Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terciptanya birokrasi dengan integritas dan kinerja tinggi.

d. Nilai Budaya Kerja

Nilai budaya kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu Bersih, Ikhlas, Melayani, Akuntabel, dan Profesional yang selanjutnya disebut **“Beriman Profesional”**. Nilai budaya kerja tersebut mengandung maksud sebagai berikut:

- 1) Bersih mengandung arti bersih dalam berpikir, bertindak, dan bekerja, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Ikhlas yaitu dalam norma etika dan agama dapat diartikan rela sepenuh hati, datang dari lubuk hati, tidak mengharapkan imbalan atau balas atas suatu perbuatan, khususnya yang berdampak positif pada orang lain, dan semata-mata karena menjalankan tugas/amanah demi Tuhan Yang Maha Kuasa;
- 3) Melayani yaitu memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna dan berhasil guna yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan;
- 4) Akuntabel yaitu dalam melaksanakan tugas dapat mempertanggungjawabkan baik segi proses maupun hasil;
- 5) Profesional yaitu dalam melaksanakan tugas selalu menyelesaikan secara baik, tuntas dan sesuai kompetensi/keahlian, orang yang terampil, andal dan sangat bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya.

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo, Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Purworejo.

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Purworejo adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan oleh perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 4) pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
- 5) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 6) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 7) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
- 8) pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

c. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo, Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Purworejo terdiri dari :

- 1) Inspektur;
- 2) Sekretariat;
- 3) Inspektur Pembantu I;
- 4) Inspektur Pembantu II;
- 5) Inspektur Pembantu III;
- 6) Inspektur Pembantu IV;

7) Inspektur Pembantu V; dan

8) Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat selengkapnya terdapat dalam Bagan I halaman 13.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

1) Inspektur

Inspektur mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan mengoordinasikan penyelenggaraan tugas Inspektur Pembantu secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta umum, kepegawaian dan keuangan.

Fungsi:

- a) pengoordinasian perumusan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- b) pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan internal;
- c) pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- d) pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- e) pengoordinasian pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
- f) pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan administrasi umum;
- g) pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah;

- h) pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
- i) pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- j) pengoordinasian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
- k) pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- l) pengoordinasian petaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- m) pengoordinasian perumusan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
- n) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas :

- a) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kebudayaan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan, perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan kinerja pemerintah daerah; dan
- c) mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama pengawasan internal.

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas :

- a) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dari Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dari pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, keuangan, dan penyelenggara fungsi pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- b) mengoordinasikan pelaksanaan reviu Laporan keuangan; dan
- c) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan desa.

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas :

- a) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran, penanaman modal, unit pelayanan terpadu, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, tenaga kerja, transmigrasi, dan penyelenggara fungsi menyusun kebijakan dan

pengkoordinasian administratif terhadap melaksanakan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;

- b) mengoordinasikan pelaksanaan reviu laporan kinerja; dan
- c) mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan dan asistensi urusan Pemerintah daerah.

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas :

- a) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, pangan, kehutanan, pertanian, kelautan dan perikanan, kepegawaian, pendidikan dan latihan; dan
- b) mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan keuangan pemerintah daerah.

Inspektur Pembantu V mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- b) melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- c) melaksanakan pengawasan, pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- d) melaksanakan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah;
- e) melaksanakan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
- f) melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum; dan

- g) melaksanakan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V, menyelenggarakan fungsi :

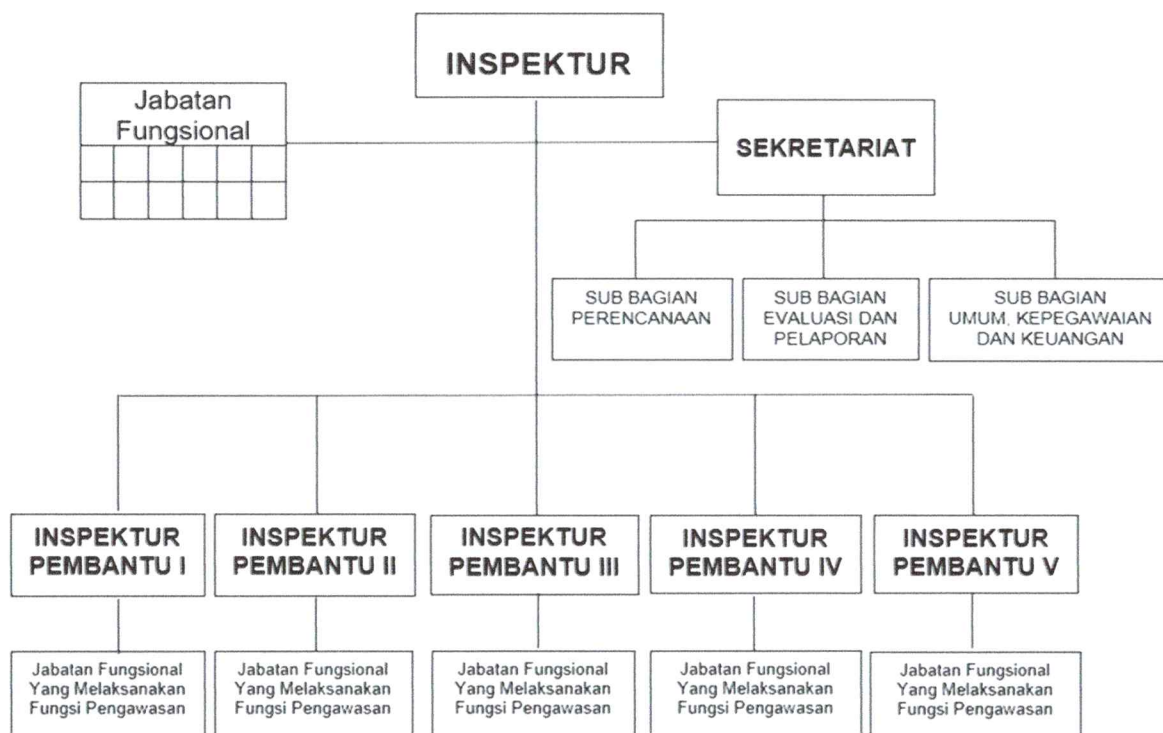
- a) penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan;
- b) pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c) pengoordinasian dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- d) pelaksanaan pengusulan program pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- e) pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- f) pelaksanaan pengusulan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g) pelaksanaan pengusulan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
- h) pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian, penelaahan dan klarifikasi hal-hal yang berkaitan dengan tugas pengawasan dan kasus pengaduan; dan
- i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsi.

4) Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Purworejo sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2021, sebagaimana dalam Bagan 1.

Bagan 1
STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO



d. Menurut Golongan/Ruang

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan IV/c	2 Orang
2	Golongan IV/b	8 Orang
3	Golongan IV/a	8 Orang
4	Golongan III/d	10 Orang
5	Golongan III/c	7 Orang
6	Golongan III/b	21 Orang
7	Golongan III/a	2 Orang
8	Golongan II/d	6 Orang
9	Golongan II/c	0 Orang
10	Golongan II/b	1 Orang
11	Golongan II/a	0 Orang
12	Tenaga kontrak	5 Orang
	Jumlah	70 Orang

Sumber : Data Nominatif Pegawai per 31 Desember 2023.

4. Sumber Daya Anggaran Inspektorat Kabupaten Purworejo

Sumber daya anggaran Inspektorat Kabupaten Purworejo mendapatkan alokasi khusus dari Pemerintah Kabupaten Purworejo. Hal ini telah sesuai dengan apa yang dimanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. Kegiatan Pengawasan, meliputi:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar,

- c. Sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari Total Belanja Daerah, dengan klasifikasi Pemerintah Daerah dengan Total Belanja Daerah diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengalokasikan Anggaran Pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Purworejo sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN TA 2023 (Rp)
I	Belanja Operasi	
1	Belanja Pegawai	9.396.690.074,00
2	Belanja Barang dan Jasa	5.333.163.300,00
	Jumlah Belanja Operasi	14.729.853.374,00
II	Belanja Modal	
1	Belanja Modal Tanah	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	224.687.700,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	219.815.250,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00
	Jumlah Belanja Modal	444.502.950,00
	JUMLAH BELANJA (I+II)	15.174.356.324,00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran TA 2023.

5. Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Purworejo

Inspektorat Kabupaten Purworejo menempati kantor dengan alamat di Jalan Mayjend Sutoyo No. 59 Purworejo. Sarana dan Prasarana

yang tersedia terdiri dari gedung kantor, ruang pertemuan, gudang, tempat parkir dan halaman serta sarana prasarana lain yang meliputi :

No	Uraian	Jumlah
1	Kendaraan dinas roda 4	6 Unit
2	Kendaraan dinas roda 2	7 Unit
3	Komputer PC	10 Unit
4	Laptop	34 Unit
5	Printer	46 Unit
6	Kursi rapat	123 Unit
7	Meja rapat	45 Unit
8	Kursi kerja	72 Unit
9	Meja kerja	72 Unit
10	Kursi tamu	12 Unit
11	Televisi	2 Unit
12	Tablet	3 Unit
13	Almari arsip	24 Unit
14	AC ruangan	20 Unit
15	Mesin Diesel/Genset	2 Unit
16	Pompa Air	2 Unit
17	<i>Sound System</i>	2 Unit
18	<i>Wireless Mic</i>	1 Unit
19	Filling Kabinet	21 Unit
20	Rak Arsip	20 Unit
21	Gedung perkantoran	1 Unit

Sumber : Data Kartu Inventaris Barang per 31 Desember 2023.

E. Isu Strategis

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan

menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat. Isu strategis yang muncul adalah "Belum optimalnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Implementasi program Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi seluruh OPD, Meningkatkan kapasitas kelembagaan *Internal Audit Capability Model* (IACM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo".

Isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Inspektorat dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat selama Tahun 2023, menjadikan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat baik yang berasal dari kondisi internal maupun kondisi eksternal antara lain :

1. Kondisi Internal :

- a. Masih lemahnya penerapan pengawasan secara berkala pada Perangkat Daerah, BUMD dan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- b. Penyelesaian kasus pengaduan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kerja sama bidang pengawasan dengan aparat pengawasan internal dan eksternal;
- d. Mendorong peningkatan penerapan SPIP pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- e. Melakukan monitoring dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan internal dan eksternal;
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pemberian layanan konsultasi bidang pengawasan;
- h. Mengawal pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah;
- i. Pengembangan kapasitas dan kompetensi yang berkesinambungan bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- j. Meningkatkan sarana teknologi dan sistemn informasi untuk pengembangan mekanisme Pengawasan;
- k. Mengoptimalkan penerapan kendali mutu audit;

- l. Melakukan prioritas pengawasan dengan berdasar *audit risk based*;
- m. Penyelenggaraan layanan internal Inspektorat yang prima.

2. Kondisi Eksternal :

- a. Adanya *support* dari Pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan maupun fasilitas untuk menunjang peran dan kedudukan Inspektorat.
- b. Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
- c. Semakin tingginya tuntutan dan peran Inspektorat dalam mengawal kebijakan pemerintah pusat antara lain KPK, BPK, LKPP maupun kementerian dan lembaga teknis lainnya.
- d. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi isu yang tidak dapat lepas dari peran Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan.
- e. Antisipasi dampak keterbatasan kemampuan keuangan Daerah namun tetap menuntut Inspektorat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya secara memadai.

F. Sistematika Penyusunan LKjIP Inspektorat Purworejo

- 1. Bab I : Pendahuluan.

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, profil organisasi (budaya organisasi, tugas pokok fungsi, sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sarana dan prasarana) dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Inspektorat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, serta Sistematika Penulisan LKjIP.

2. Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.
Berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023.
3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja.
Berisi tentang capaian kinerja Inspektorat Purworejo untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi Tahun 2023, dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
4. Bab IV : Penutup.
Berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2024.
5. Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah akan lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

1. Rencana Strategis Inspektorat

Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis untuk jangka waktu 5 tahun yang menjabarkan potret permasalahan organisasi serta indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan dan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan. Acuan utama dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Purworejo adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Bupati/ Wakil Bupati terpilih. Hal ini berarti bahwa LKjIP Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023 merupakan pengukuran Tahun Ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah

dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada misi yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo selama 5 (lima) Tahun mendatang. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebanyak 17 sasaran strategis.

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Purworejo yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, adalah:

Tabel 2

Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Purworejo

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bersih melalui pengawasan internal yang berkualitas.	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP

Sumber : Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Inspektorat Kabupaten Purworejo ditetapkan mendukung indikator tujuan yaitu Indeks Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia dengan sasaran yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel.

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran secara maksimal maka strategi yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan adalah,

- a. Optimalisasi Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan bidang fasilitasi pengawasan;
- c. Optimalisasi peran APIP dalam *consulting* dan anti *corruption activity* melalui pendampingan dan asistensi reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- d. Mendorong terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada masing-masing Perangkat Daerah;
- e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan APIP sesuai *Internal Audit Capacity Model* (IACM).

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat dan meningkatkan akuntabilitas instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing SKPD yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, Inspektur Kabupaten Purworejo telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 160.18/17/2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dengan rincian Target sebagai berikut adalah :

Tabel 3
Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 2021-2026

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target kinerja						Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP	Tingkat maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada seluruh elemen minimal level 3	3,023	3,023	3,075	3,100	3,130	3,170	3,190	3,190
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,93	80,93	81,50	82,70	83,00	83,50	84,00	84,00

Sumber : Keputusan Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 160.18/17/2023 Tanggal 6 Januari 2023 tentang Penetapan IKU Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan (Bupati Purworejo) dan bawahan (Inspektur) untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan Kinerja antara Bupati Purworejo dengan Inspektur Kabupaten Purworejo berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berdasarkan Target Kinerja Sasaran di Tahun 2023 yang tersaji pada Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 2023

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023
1	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP	Tingkat Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada seluruh Elemen minimal Level 3	3,100
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,70

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Kabupaten Purworejo dengan Bupati Tahun 2023.

Upaya untuk mencapai target indikator kinerja utama tersebut di dukung melalui 3 program dengan 14 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan. Rincian program dan Indikator Program beserta target di Tahun 2023 yang merupakan Perjanjian Kinerja antara Inspektur dengan jajaran Pejabat Eselon III di Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023 tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Program, Indikator Kinerja Program dan Pagu Program Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		
			Target	Satuan	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	%	11.991.228.524,00
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	%	1.465.235.800,00
		Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	100	%	355.230.500,00
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan	100	%	109.792.400,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		
			Target	Satuan	Rp
		Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi	100	%	1.252.869.100,00
JUMLAH					15.174.356.324,00

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dengan Inspektur Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Adapun rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta target di Tahun 2023 yang merupakan Perjanjian Kinerja antara Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon IV di Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023 tercantum dalam tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Penetapan Kinerja, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan
Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		
			K	Satuan	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	%	11.991.228.524,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Dokumen	50.753.800,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	21.352.300,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1.696.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	2.466.600,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		
			K	Satuan	Rp
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.625.200,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	2.684.300,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Laporan	6.182.600,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	13.746.800,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	9.410.796.574,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68	orang/bulan	9.396.010.074,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	7.265.300,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	4.057.200,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26	Laporan	3.464.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	100	%	5.634.600,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	2.550.700,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		
			K	Satuan	Rp
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	3.083.900,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	1.287.921.800,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	119.469.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	68	Orang	1.134.692.100,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	68	Orang	16.601.600,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	17.159.100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	345.523.900,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	14.720.100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2.134.800,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	11.853.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	67.914.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	37.070.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	Dokumen	2.796.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	20.087.900,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	8.480.000,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		
			K	Satuan	Rp
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	160.465.800,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dokumen	16.202.300,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	3.800.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Jenis	217.539.700,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	Unit	173.575.600,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	Unit	43.964.100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Laporan	154.917.900,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	650.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	105.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	49.267.900,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	Jenis	518.140.250,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	10.429.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	52.664.000,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		
			K	Satuan	Rp
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83	Unit	54.118.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	377.495.250,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27	Unit	23.434.000,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	%	1.465.235.800,00
		Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	100	%	355.230.500,00
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7	Dokumen	1.465.235.800,00
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	162	Laporan	227.720.500,00
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	115	Laporan	140.543.600,00
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Laporan	34.894.000,00
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	32	Laporan	100.982.300,00
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	87	Laporan	278.566.100,00
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2	Kesepakatan	35.893.300,00
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6	Dokumen	646.636.000,00
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2	Laporan	355.230.500,00
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3	Laporan	82.529.400,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		
			K	Satuan	Rp
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	94	Laporan	272.701.100,00
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan	100	%	109.792.400,00
		Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi	100	%	1.252.869.100,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2	Dokumen	109.792.400,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2	Rekomendasi	66.409.800,00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3	Rekomendasi	43.382.600,00
	Pendampingan dan Asistensi	Tersusunnya Laporan hasil Pendampingan dan Asistensi	4	Laporan	1.252.869.100,00
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6	Perangkat Daerah	13.907.000,00
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	152	Perangkat Daerah	247.214.400,00
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3	Kegiatan	809.894.300,00
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	165	Perangkat Daerah	181.853.400,00
JUMLAH					15.174.356.324,00

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dengan Inspektur Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo adalah perwujudan kewajiban Inspektorat Kabupaten Purworejo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT

Tahun anggaran 2023 Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis yang direncanakan sebagai bagian dari Rencana Strategis. Kegiatan dimaksud telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Bupati Purworejo dengan Inspektur Kabupaten Purworejo, Inspektur Kabupaten Purworejo dengan Pejabat Eselon 3 dan Pejabat Eselon 3 dengan Pejabat Eselon 4 di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Purworejo. Realisasi capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di Tahun 2023 dapat dijelaskan rincian realisasi kinerja sasaran sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 7
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Ket.
1	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP	Tingkat Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada seluruh Elemen minimal Level 3	3,100	3,309	Tercapai
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,70	84,33	Tercapai

a. Sasaran Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP

Sasaran ini Indikator Kinerja Utamanya adalah **“Tingkat maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada seluruh elemen minimal level 3”**. Pencapaian target kinerja sasaran ini didukung 2 (dua) Program yaitu :

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan adalah :

- Persentase penyelenggaraan pengawasan internal;
- Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi,

Indikator Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi adalah:

- Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitas Pengawasan;
- Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi.

Realisasi capaian kinerja sasaran dengan target indikator *“Tingkat maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada seluruh elemen minimal level 3”* adalah 100% (3,309 dari target tingkat maturitas SPIP Tahun 2023 sebesar 3,100 dan 3,050 dari target level kapabilitas APIP Tahun 2023 level 3) atau dengan Status Capaian **“Tercapai”**.

Capaian indikator sasaran sebesar 100% ini didukung dengan bukti dukung berupa Surat Deputi Kepala BPKP RI Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 Tanggal 28 Desember 2023 perihal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 serta Laporan Hasil Evaluasi Jenjang Pertama Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Kabupaten Purworejo Nomor PE.09.03/LHP-44/PW12/6/2023 Tanggal 30 November 2023.

b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran ini Indikator Kinerja Utamanya **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**. Pencapaian target kinerja sasaran ini didukung 1

(satu) Program yaitu Kabupaten Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Program Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Realisasi capaian kinerja sasaran dengan target indikator “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” adalah 100% (Nilai IKM 84,33 dari target Tahun 2023 sebesar 82,70) atau dengan Status Capaian “**Tercapai**”.

Capaian indikator sasaran sebesar 100% ini didukung dengan bukti dukung berupa Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Inspektorat Kabupaten Purworejo.

Atas kondisi yang telah dicapai yaitu Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2023 sebesar 3,309 atau tercapai 100% dari target sebesar 3,100 upaya selanjutnya adalah perlu kiat-kiat mempertahankan maturitas pada level 3, karena hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas SPIP dapat juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Diharapkan implementasi SPIP terus dapat ditingkatkan, dan beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam implementasi SPIP dapat menjadi instrumen pendorong untuk lebih meningkatkan hal-hal yang masih perlu diperbaiki.

2. Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2023

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di Tahun 2023, Guna mendukung Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan 3 (tiga) Program. Realisasi kinerja program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2023

No	Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Tahun 2023		Ket.
			Target	Satuan	Target	Satuan	
I	Sasaran : Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP						
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	%	100	%	Tercapai

No	Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Tahun 2023		Ket.
			Target	Satuan	Target	Satuan	
		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	%	100	%	Tercapai
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan	100	%	100	%	Tercapai
		Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi	100	%	100	%	Tercapai
II	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	%	100	%	Tercapai

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan ini Indikator Kinerja Programnya adalah:

- 1) Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan target Kinerja Tahun 2023 adalah 100%;
- 2) Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan target Kinerja Tahun 2023 adalah 100%.

Realisasi capaian kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Indikator Kinerja Program adalah:

- 1) Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan target Kinerja Tahun 2023 adalah 100% (Nilai Capaian kinerja 100% dari target Tahun 2023 sebesar 100%) atau dengan Status Capaian **"Tercapai"**.
- 2) Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan target Kinerja Tahun 2023 adalah 100%(Nilai Capaian kinerja 100% dari target Tahun 2023 sebesar 100%) atau dengan Status Capaian **"Tercapai"**.

Capaian indikator Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar 100% ini didukung dengan penjelasan pada tabel berikut:

Tabel 9
Target dan Realisasi Kinerja
Program Penyelenggaraan Pengawasan Tahun 2023

No	Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Tahun 2023		Ket.
			Target	Satuan	Target	Satuan	
	Sasaran: Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP						
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100	%	100	%	Tercapai
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7	Dokumen	7	Dokumen	Tercapai
		2. Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	100	%	100	%	Tercapai
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2	Laporan	2	Laporan	Tercapai

Pencapaian kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan didukung dengan 2 (dua) Kegiatan beserta indikatornya, dengan realisasi sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Indikator Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan Target Kinerja 7 Dokumen.

Realisasi capaian kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal adalah 100% (Realisasi 7 Dokumen dari target Tahun 2023 7 Dokumen), yaitu berupa Dokumen:

- (a) Dokumen Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
- (b) Dokumen Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
- (c) Dokumen Hasil Reviu Laporan Kinerja;
- (d) Dokumen Hasil Reviu Laporan Keuangan;
- (e) Dokumen Hasil Pengawasan Desa;
- (f) Dokumen Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk;
- (g) Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Indikator Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu adalah Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan Target Kinerja 2 Laporan.

Realisasi capaian kinerja Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu adalah 100% (Realisasi 2 Laporan dari target Tahun 2023 2 Laporan), yaitu berupa Laporan:

- (a) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
- (b) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi ini Indikator Kinerja Programnya adalah:

- 1) Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitasi Pengawasan dengan target Kinerja Tahun 2023 adalah 100%;
- 2) Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi dengan target Kinerja Tahun 2023 adalah 100%.

Realisasi capaian kinerja Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi dengan Indikator Kinerja Program adalah:

- 1) Persentase Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitas Pengawasan dengan target Kinerja Tahun 2023 adalah 100% (Nilai Capaian kinerja 100% dari target Tahun 2023 sebesar 100%) atau dengan Status Capaian **"Tercapai"**.
- 2) Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi dengan target Kinerja Tahun 2023 adalah 100% (Nilai Capaian kinerja 100% dari target Tahun 2023 sebesar 100%) atau dengan Status Capaian **"Tercapai"**.

Capaian indikator Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi sebesar 100% ini didukung dengan penjelasan pada tabel berikut:

Tabel 10
Target dan Realisasi Kinerja
Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
Tahun 2023

No	Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Tahun 2023		Ket.
			Target	Satuan	Target	Satuan	
	Sasaran: Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP						
	Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	1. Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Bidang Fasilitas Pengawasan	100	%	100	%	Tercapai
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	2	Dokumen	2	Dokumen	Tercapai
		2. Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi	100	%	100	%	Tercapai
1	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Tersusunnya Laporan hasil Pendampingan dan Asistensi	4	Laporan	4	Laporan	Tercapai

Pencapaian kinerja Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi didukung dengan 2 (dua) Kegiatan beserta indikatornya, dengan realisasi sebagai berikut:

1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Indikator Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan adalah Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan Target Kinerja 2 Dokumen. Realisasi capaian kinerja Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan adalah 100% (Realisasi 2 Dokumen dari target Tahun 2023 2 Dokumen), yaitu berupa Dokumen:

- (a) Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
- (b) Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan;

2) Pendampingan dan Asistensi

Indikator Kegiatan Pendampingan dan Asistensi adalah Tersusunnya Laporan hasil Pendampingan dan Asistensi dengan Target Kinerja 4 Laporan.

Realisasi capaian kinerja Tersusunnya Laporan hasil Pendampingan dan Asistensi adalah 100% (Realisasi 4 Laporan dari target Tahun 2023 4 Laporan), yaitu berupa Laporan:

- (a) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
- (b) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
- (c) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- (d) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini Indikator Kinerja Programnya adalah **Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten** dengan target Kinerja Tahun 2023 adalah 100%.

Realisasi capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja Program adalah Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah 100% (Nilai Capaian kinerja 100% dari target Tahun 2023 sebesar 100%) atau dengan Status Capaian **“Tercapai”**.

Capaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100% ini didukung dengan penjelasan pada tabel berikut:

Tabel 11

Target dan Realisasi Kinerja Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Tahun 2023		Ket.
			Target	Satuan	Target	Satuan	
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	%	100	%	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Dokumen	7	Dokumen	Tercapai
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100	%	Tercapai

No	Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Tahun 2023		Ket.
			Target	Satuan	Target	Satuan	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	100	%	100	%	Tercapai
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100	%	Tercapai
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	Tercapai
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Jenis	2	Jenis	Tercapai
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Laporan	3	Laporan	Tercapai
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	Jenis	5	Jenis	Tercapai

Sumber : Data olahan Inspektorat Kabupaten Purworejo.

Pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 7 (tujuh) Kegiatan beserta indikatornya, dengan realisasi sebagai berikut:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Indikator Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Target Kinerja 7 Dokumen.

Realisasi capaian kinerja Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah 100%, yaitu berupa 7 Dokumen:

- (a) Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- (b) Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- (c) Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- (d) Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
- (e) Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- (f) Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- (g) Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Indikator Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Target Kinerja 100%.

Realisasi capaian kinerja Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah 100% berupa pelayanan pada:

- (a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- (b) Penyediaan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- (c) Penyediaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- (d) Penyediaan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
Indikator Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah adalah Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah.
Realisasi capaian kinerja Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah adalah 100% berupa pelayanan pada:
 - (a) Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - (b) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
Indikator Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Realisasi capaian kinerja Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah 100% berupa pelayanan pada:
 - (a) Penyediaan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - (b) Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - (c) Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - (d) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
Indikator Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Realisasi capaian kinerja Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah 100% berupa pelayanan pada:
 - (a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - (b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - (c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - (d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - (e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - (f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

- (g) Penyediaan Bahan/Material;
- (h) Fasilitas Kunjungan Tamu;
- (i) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- (j) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- (k) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Indikator Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Realisasi capaian kinerja Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah 2 Jenis, berupa:

- (a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- (b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Indikator Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Realisasi capaian kinerja Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah 3 Laporan, berupa:

- (a) Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- (b) Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- (c) Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Indikator Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Realisasi capaian kinerja Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah 3 jenis, berupa:

- (a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- (b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- (c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- (d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- (e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

3. Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan di Tahun 2023, Guna mendukung Program yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Purworejo melaksanakan 12 (duabelas) Kegiatan dan 59 (limapuluh sembilan) Sub Kegiatan. Realisasi kinerja kegiatan dan sub kegiatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Tahun 2023		Ket.
			Target	Satuan	Target	Satuan	
I	Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan						
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal	7	Dokumen	7	Dokumen	Tercapai
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	162	Laporan	169	Laporan	Tercapai

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Tahun 2023		Ket.
			Target	Satuan	Target	Satuan	
		Kinerja Pemerintah Daerah					
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	115	Laporan	132	Laporan	Tercapai
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	Laporan	2	Laporan	Tercapai
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	32	Laporan	32	Laporan	Tercapai
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	87	Laporan	125	Laporan	Tercapai
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2	Kesepakatan	2	Kesepakatan	Tercapai
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6	Dokumen	6	Dokumen	Tercapai
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2	Laporan	2	Laporan	Tercapai
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3	Laporan	3	Laporan	Tercapai
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	94	Laporan	134	Laporan	Tercapai
II	Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi						
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis	2	Dokumen	2	Dokumen	Tercapai

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Tahun 2023		Ket.
			Target	Satuan	Target	Satuan	
	Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2	Rekomen dasi	3	Rekomen dasi	Tercapai
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3	Rekomen dasi	14	Rekomen dasi	Tercapai
2	Pendampingan dan Asistensi	Tersusunnya Laporan hasil Pendampingan dan Asistensi	4	Laporan	4	Laporan	Tercapai
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6	Perangkat Daerah	6	Perangkat Daerah	Tercapai
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	152	Perangkat Daerah	158	Perangkat Daerah	Tercapai
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3	Kegiatan	3	Kegiatan	Tercapai
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan	165	Perangkat Daerah	165	Perangkat Daerah	Tercapai

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Tahun 2023		Ket.
			Target	Satuan	Target	Satuan	
		Verifikasi Penegakan Integritas					
III	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Dokumen	7	Dokumen	Tercapai
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	15	Dokumen	Tercapai
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	Tercapai
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	Tercapai
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	Tercapai
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	Tercapai
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	16	Laporan	16	Laporan	Tercapai

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Tahun 2023		Ket.
			Target	Satuan	Target	Satuan	
	Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	4	Laporan	Tercapai
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100	%	Tercapai
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68	Orang/ Bulan	65	Orang/ Bulan	Tidak Tercapai
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	Tercapai
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	6	Laporan	Tercapai
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	26	Laporan	26	Laporan	Tercapai
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	100	%	100	%	Tercapai
	Penyusunan Perencanaan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	Tercapai

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Tahun 2023		Ket.
			Target	Satuan	Target	Satuan	
	Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan	2	Laporan	Tercapai
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	100	%	Tercapai
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	1	Dokumen	Tercapai
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	68	Orang	71	Orang	Melebihi Target
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	68	Orang	110	Orang	Melebihi Target
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	45	Orang	Tidak Tercapai
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	%	Tercapai
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	Tercapai
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	Tercapai
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket	2	Paket	Tercapai

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Tahun 2023		Ket.
			Target	Satuan	Target	Satuan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	Tercapai
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	Tercapai
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2	Dokumen	2	Dokumen	Tercapai
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	Tercapai
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	Laporan	Tercapai
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	Tercapai
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	Dokumen	4	Dokumen	Tercapai
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2	Dokumen	2	Dokumen	Tercapai
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2	Jenis	2	Jenis	Tercapai
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	Unit	16	Unit	Tercapai
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8	Unit	8	Unit	Tercapai

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Tahun 2023		Ket.
			Target	Satuan	Target	Satuan	
		Bangunan Lainnya yang Disediakan					
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Laporan	3	Laporan	Tercapai
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	Tercapai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	12	Laporan	Tercapai
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	12	Laporan	Tercapai
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	Jenis	5	Jenis	Tercapai
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	Unit	Tercapai
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	11	Unit	Tercapai
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83	Unit	82	Unit	Tidak Tercapai
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	Tercapai
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27	Unit	26	Unit	Tidak Tercapai

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Tahun 2023		Realisasi Kinerja Tahun 2023		Ket.
			Target	Satuan	Target	Satuan	
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/ Direhabilitasi					

Penjelasan rinci pencapaian kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal didukung dengan 7 sub Kegiatan. Rencana dan realisasi atas indikator sub kegiatan adalah sebagai berikut :

a) Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah

Rencana dan realisasi sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan/ Rencana Output	Jumlah	Sub Kegiatan/Realisasi Output	Jumlah	Ket
I	Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah, dengan rincian :	162	Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah dengan rincian :	169	Melebihi Target
	Laporan hasil Pemeriksaan Kinerja PD	12	Laporan hasil Pemeriksaan Kinerja PD	12	Tercapai
	Laporan Evauasi Dokumen MR	41	Laporan Evauasi Dokumen MR	43	Melebihi Target
	Laporan Pendampingan Penyusunan MR	41	Laporan Pendampingan Penyusunan MR	28	Tidak Tercapai
	Laporan Hasil Reviu Renja	16	Laporan Hasil Reviu Renja	18	Melebihi
	Laporan Hasil Reviu RKPD	4	Laporan Hasil Reviu RKPD	4	Tercapai
	Laporan Hasil PK SPIP	11	Laporan Hasil PK SPIP	11	Tercapai
	Laporan Hasil Pemeriksaan Tata Kelola BUMD	4	Laporan Hasil Pemeriksaan Tata Kelola BUMD	3	Tidak Tercapai
	Laporan Reviu Tata Kelola UKPBJ	3	Laporan Reviu Tata Kelola UKPBJ	3	Tercapai
	Reviu Tata Kelola Perijinan dan Non Perijinan	3	Reviu Tata Kelola Perijinan dan Non Perijinan	3	Tercapai
	Laporan Hasil Pemeriksaan Ketaatan Pelaksanaan Urusan	12	Laporan Hasil Pemeriksaan Ketaatan Pelaksanaan Urusan	8	Tidak Tercapai

	Laporan Hasil Pemeriksaan Tata Kelola BLUD	12	Laporan Hasil Pemeriksaan Tata Kelola BLUD	12	Tercapai
	Laporan Reviu Implementasi IT E-Purchasing	3	Laporan Reviu Implementasi IT E-Purchasing	3	Tercapai
	-	-	Laporan Hasil Validasi Dokumen MR	21	Melebihi Target

Realisasi capaian kinerja Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah adalah 104,32% (Nilai Capaian kinerja 196 Laporan dari target Tahun 2023 sebanyak 162 Laporan) atau dengan Status Capaian **“Melebihi Target”**.

Terdapat output yang tidak tercapai yaitu Laporan Pendampingan Penyusunan MR, Laporan Hasil Pemeriksaan Tata Kelola BUMD, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Ketaatan Pelaksanaan Urusan karena adanya penambahan target kegiatan yang harus dilaksanakan yaitu Validasi Dokumen MR dengan target kinerja 21 Laporan Hasil Validasi Dokumen MR, sehingga secara total Target Kinerja Sub Kegiatan tetap **“Tercapai”**.

b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Rencana dan realisasi sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan/ Rencana Output	Jumlah	Sub Kegiatan/Realisasi Output	Jumlah	Ket
II	Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah, dengan rincian :	115	Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah dengan rincian :	132	Melebihi Target
	Laporan hasil Reviu KUA PPAS	4	Laporan hasil Reviu KUA PPAS	4	Tercapai
	Laporan hasil Reviu RKA	16	Laporan hasil Reviu RKA	16	Tercapai
	Laporan hasil Reviu DAK	55	Laporan hasil Reviu DAK	66	Melebihi Target
	Laporan hasil Reviu DAU yang ditentukan penggunaannya	24	Laporan hasil Reviu DAU yang ditentukan penggunaannya	26	Melebihi Target

	Laporan hasil Pengawasan Pengelolaan keuangan Sekolah	12	Laporan hasil Pengawasan Pengelolaan keuangan Sekolah	12	Tercapai
	Laporan hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah	4	Laporan hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah	4	Tercapai
	-	-	Laporan hasil Reviu sisa dana BOS	1	Melebihi Target
	-	-	Laporan hasil Reviu sisa dana BOK	1	Melebihi Target
	-	-	Laporan hasil Reviu sisa dana BOP	1	Melebihi Target
	-	-	Laporan hasil Verifikasi dan validasi sisa dana BOS	1	Melebihi Target

Realisasi capaian kinerja Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah adalah 114,78% (Nilai Capaian kinerja 132 Laporan dari target Tahun 2023 sebanyak 115 Laporan) atau dengan Status Capaian **“Melebihi Target”**.

Terdapat output yang melebihi target karena kewajiban Inspektorat sesuai amanah peraturan perundang-undangan yaitu Laporan hasil Reviu sisa dana BOS, Laporan hasil Reviu sisa dana BOK, Laporan hasil Reviu sisa dana BOP, Laporan hasil Verifikasi dan validasi sisa dana BOS.

c) Reviu Laporan Kinerja

Rencana dan realisasi sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan/ Rencana Output	Jumlah	Sub Kegiatan/Realisasi Output	Jumlah	Ket
III	Reviu Laporan Kinerja, dengan rincian :	2	Reviu Laporan Kinerja, dengan rincian :	2	Tercapai
	Laporan hasil Reviu LPPD	1	Laporan hasil Reviu KUA PPAS	1	Tercapai
	Laporan hasil Reviu LKjIP	1	Laporan hasil Reviu RKA	1	Tercapai

Realisasi capaian kinerja Reviu Laporan Kinerja adalah 100% (Nilai Capaian kinerja 2 Laporan dari target Tahun 2023 sebanyak 2 Laporan) atau dengan Status Capaian **“Tercapai”**.

d) Reviu Laporan Keuangan

Rencana dan realisasi sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan/ Rencana Output	Jumlah	Sub Kegiatan/Realisasi Output	Jumlah	Ket
IV	Reviu Laporan Keuangan, dengan rincian :	32	Reviu Laporan Keuangan, dengan rincian :	32	Tercapai
	Laporan hasil Reviu LKPD	1	Laporan hasil Reviu LKPD	1	Tercapai
	Laporan hasil Reviu LK BLUD	29	Laporan hasil Reviu LK BLUD	29	Tercapai
	Laporan Hasil Pendampingan Penyelesaian Temuan BPK	2	Laporan Hasil Pendampingan Penyelesaian Temuan BPK	2	Tercapai

Realisasi capaian kinerja Reviu Laporan Keuangan adalah 100% (Nilai Capaian kinerja 32 Laporan dari target Tahun 2023 sebanyak 32 Laporan) atau dengan Status Capaian **“Tercapai”**.

e) Pengawasan Desa

Rencana dan realisasi sub kegiatan Pengawasan Desa adalah sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan/ Rencana Output	Jumlah	Sub Kegiatan/Realisasi Output	Jumlah	Ket
V	Pengawasan Desa, dengan rincian :	87	Pengawasan Desa, dengan rincian :	125	Melebihi Target
	Laporan hasil Pemeriksaan Desa	24	Laporan hasil Pemeriksaan Desa	25	Melebihi Target
	Laporan hasil Pendampingan Desa	45	Laporan hasil Pendampingan Desa	52	Melebihi Target
	Laporan hasil Penyusunan Data Siswaskeudes	1	Laporan hasil Penyusunan Data Siswaskeudes	16	Melebihi Target

No	Sub Kegiatan/ Rencana Output	Jumlah	Sub Kegiatan/Realisasi Output	Jumlah	Ket
	Laporan hasil Pemantauan Inventarisasi Aset Desa	16	Laporan hasil Pemantauan Inventarisasi Aset Desa	16	Tercapai
	Laporan hasil Monev Pengelolaan Dana Desa	1	Laporan hasil Monev Pengelolaan Dana Desa	16	Melebihi Target

Realisasi capaian kinerja Pengawasan Desa adalah 143,68% (Nilai Capaian kinerja 125 Laporan dari target Tahun 2023 sebanyak 87 Laporan) atau dengan Status Capaian **“Melebihi Target”**.

f) Kerjasama Pengawasan Internal

Rencana dan realisasi sub kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal adalah sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan/ Rencana Output	Jumlah	Sub Kegiatan/Realisasi Output	Jumlah	Ket
VI	Kerjasama Pengawasan Internal, dengan rincian :	2	Kerjasama Pengawasan Internal, dengan rincian :	125	Tercapai
	Kerjasama APIP - APH	1	Kerjasama APIP - APH	0	Tidak Tercapai
	Kerjasama APIP - BPKP	1	Kerjasama APIP – BPKP dalam Asistensi Pendampingan RTLH oleh BPKP	2	Melebihi Target

Realisasi capaian kinerja sub kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal adalah 100% (Nilai Capaian kinerja 2 kesepakatan dari target Tahun 2023 sebanyak 2 Kesepakatan) atau dengan Status Capaian **“Tercapai”**.

Kegiatan Kerjasama APIP – APH tidak terlaksana karena menyesuaikan kebutuhan, namun kerjasama APIP-BPKP melebihi target atas kegiatan Pendampingan RTLH oleh BPKP sebanyak 2 kali.

g) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Rencana dan realisasi sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP adalah sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan/ Rencana Output	Jumlah	Sub Kegiatan/Realisasi Output	Jumlah	Ket
VI	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan rincian :	6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan rincian :	6	Tercapai
	Laporan tindak lanjut hasil temuan pengawasan inspektorat	1	Laporan tindak lanjut hasil temuan pengawasan inspektorat	1	Tercapai
	Data tindak lanjut hasil temuan pengawasan BPK	1	Data tindak lanjut hasil temuan pengawasan BPK	1	Tercapai
	Data tindak lanjut hasil temuan pengawasan Inspektorat provinsi	1	Data tindak lanjut hasil temuan pengawasan Inspektorat provinsi	1	Tercapai
	Data tindak lanjut hasil temuan pengawasan APIP Lain	1	Data tindak lanjut hasil temuan pengawasan APIP Lain	1	Tercapai
	Gelar Pengawasan Daerah	1	Gelar Pengawasan Daerah	1	Tercapai
	Koordinasi Pengawasan/Rakorwas	1	Koordinasi Pengawasan/Rakorwas	1	Tercapai

Realisasi capaian kinerja sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP adalah 100% (Nilai Capaian kinerja 6 Dokumen dari target Tahun 2023 sebanyak 6 Dokumen) atau dengan Status Capaian **“Tercapai”**.

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu didukung dengan 2 sub Kegiatan. Rencana dan realisasi atas indikator sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- a) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Rencana dan realisasi sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah adalah sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan/ Rencana Output	Jumlah	Sub Kegiatan/Realisasi Output	Jumlah	Ket
I	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan rincian :	3	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan rincian :	3	Tercapai
	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	3	Tercapai

Realisasi capaian kinerja sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah adalah 100% (Nilai Capaian kinerja 3 Laporan dari target Tahun 2023 sebanyak 3 Laporan) atau dengan Status Capaian **“Tercapai”**

b) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Rencana dan realisasi sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu adalah sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan/ Rencana Output	Jumlah	Sub Kegiatan/Realisasi Output	Jumlah	Ket
I	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, dengan rincian :	94	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, dengan rincian :	134	Melebihi Target
	Laporan Hasil Klarifikasi Aduan	16	Laporan Hasil Klarifikasi Aduan	15	Tidak Tercapai
	Laporan Hasil Reviu HPS	10	Laporan Hasil Reviu HPS	11	Melebihi Target
	Laporan Hasil Reviu Manajemen ASN	1	Laporan Hasil Reviu Manajemen ASN	1	Tercapai
	Laporan Hasil Reviu Kepatuhan Pengelolaan BMD 2023	1	Laporan Hasil Reviu Kepatuhan Pengelolaan BMD 2023	1	Tercapai
	Laporan Hasil Reviu Benturan Kepentingan	2	Laporan Hasil Reviu Benturan Kepentingan	2	Tercapai
	Laporan Hasil Reviu SSH dan ASB	5	Laporan Hasil Reviu SSH dan ASB	4	Tidak Tercapai
	Laporan Hasil Reviu Evaluasi Perencanaan Berbasis Gender	1	Laporan Hasil Reviu Evaluasi Perencanaan Berbasis Gender	1	Tercapai
	Laporan Hasil Audit Investigasi	10	Laporan Hasil Audit Investigasi	18	Melebihi Target

No	Sub Kegiatan/ Rencana Output	Jumlah	Sub Kegiatan/Realisasi Output	Jumlah	Ket
	Laporan Hasil Pengawasan Pengadaan ASN	10	Laporan Hasil Pengawasan Pengadaan ASN	14	Melebihi Target
	Laporan Hasil Probitiy Audit	30	Laporan Hasil Probitiy Audit	37	Melebihi Target
	Laporan Hasil Pendampingan administrasi RTLH	3	Laporan Hasil Pendampingan administrasi RTLH	3	Tercapai
	Laporan Hasil Reviu P3DN	2	Laporan Hasil Reviu P3DN	2	Tercapai
	Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan Dan Penganggaran	1	Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan Dan Penganggaran	1	Tercapai
	Laporan Hasil Reviu Pelayanan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan	2	Laporan Hasil Reviu Pelayanan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan	0	Tidak Tercapai
	-	-	Laporan Hasil Audit Covid 19	7	Melebihi Target
	-	-	Laporan Hasil Reviu DMB Eks PNPM-MPd	1	Melebihi Target
	-	-	Laporan Hasil Reviu Data Jumlah ASN Guru yg tidak mendapatkan TPP	1	Melebihi Target
	-	-	Laporan Hasil Reviu Pokir DPRD TA 2024	1	Melebihi Target
	-	-	Laporan Hasil Reviu Kepatuhan Tata Kelola Pajak Daerah 2023	1	Melebihi Target
	-	-	Laporan Hasil Pemantauan TL LHR Tata Kelola Pajak	1	Melebihi Target
	-	-	Laporan Hasil Reviu Pelayanan Publik	2	Melebihi Target
	-	-	Laporan Hasil Audit Kepatuhan Pengelolaan Bankeu	1	Melebihi Target
	-	-	Laporan Hasil Audit Kepatuhan Pengelolaan Bansos	1	Melebihi Target
	-	-	Laporan Hasil Audit Kepatuhan Pengelolaan Bantuan Hibah	1	Melebihi Target
	-	-	Laporan Hasil Pemantauan TL	1	Melebihi Target

No	Sub Kegiatan/ Rencana Output	Jumlah	Sub Kegiatan/Realisasi Output	Jumlah	Ket
			Pengawasan Manajemen ASN		
	-	-	Laporan Hasil Pemantauan TL Evaluasi Benturan Kepentingan	2	Melebihi Target
	-	-	Laporan Hasil Pemantauan TL Reviu Tata Kelola BMD	1	Melebihi Target
	-	-	Laporan Hasil Reviu Daftar Usulan Penghapusan (Cleansing) Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan	1	Melebihi Target
	-	-	Laporan Hasil Verifikasi Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2023	1	Melebihi Target
	-	-	Laporan Hasil Verifikasi Hibah Calon Penerima Program Inpres Percepatan Penyediaan Air Minum Perkotaan Tahun 2024	1	Melebihi Target

Realisasi capaian kinerja Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu adalah 142,55% (Nilai Capaian kinerja 134 Laporan dari target Tahun 2023 sebanyak 94 Laporan) atau dengan Status Capaian **“Melebihi Target”**.

Terdapat output yang tidak tercapai yaitu Laporan Hasil Klarifikasi Aduan karena menyesuaikan kebutuhan dalam penanganan aduan yang ada, dan Laporan Hasil Reviu Pelayanan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang tidak dilaksanakan karena amanat peraturan perundang-undangan. Namun demikian terdapat penambahan target kegiatan yang harus dilaksanakan karena amanat peraturan perundang-undangan yaitu:

- Audit Covid 19;
- Reviu DMB Eks PNPM-MPd;
- Reviu Data Jumlah ASN Guru yg tidak mendapatkan TPP, Reviu Pokir DPRD TA 2024;
- Reviu Kepatuhan Tata Kelola Pajak Daerah 2023;

- Pemantauan TL LHR Tata Kelola Pajak;
- Reviu Pelayanan Publik, Audit Kepatuhan Pengelolaan Bankeu;
- Audit Kepatuhan Pengelolaan Bansos;
- Audit Kepatuhan Pengelolaan Bantuan Hibah;
- Pemantauan TL Pengawasan Manajemen ASN;
- Pemantauan TL Evaluasi Benturan Kepentingan;
- Pemantauan TL Reviu Tata Kelola BMD;
- Reviu Daftar Usulan Penghapusan (Cleansing) Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- Hasil Verifikasi Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2023;
- Hasil Verifikasi Hibah Calon Penerima Program Inpres Percepatan Penyediaan Air Minum Perkotaan Tahun 2024.

3) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan dengan 2 sub Kegiatan. Rencana dan realisasi atas indikator sub kegiatan adalah sebagai berikut :

a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Rencana dan realisasi sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan adalah sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan/ Rencana Output	Jumlah	Sub Kegiatan/Realisasi Output	Jumlah	Ket
I	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, dengan rincian :	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, dengan rincian :	3	Melebihi Target
	Rekomendasi Perbub Renbinwas	1	Rekomendasi Perbub Renbinwas	1	Tercapai
	Rekomendasi PKPT	1	Rekomendasi PKPT	1	Tercapai
	-	-	Rekomendasi PKAU	1	Melebihi Target

Realisasi capaian kinerja Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan adalah 150% (Nilai Capaian kinerja 2 Rekomendasi dari target Tahun 2023 sebanyak 3 Rekomendasi) atau dengan Status Capaian **“Melebihi Target”**.

b) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan

Rencana dan realisasi sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan adalah sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan/ Rencana Output	Jumlah	Sub Kegiatan/Realisasi Output	Jumlah	Ket
I	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, dengan rincian :	3	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, dengan rincian :	14	Melebihi Target
	Rekomendasi SOP	3	Rekomendasi SOP	14	Melebihi Target

Realisasi capaian kinerja Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan adalah 150% (Nilai Capaian kinerja 3 Rekomendasi dari target Tahun 2023 sebanyak 14 Rekomendasi) atau dengan Status Capaian **“Melebihi Target”**.

4) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan 2 sub Kegiatan. Rencana dan realisasi atas indikator sub kegiatan adalah sebagai berikut :

a) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana dan realisasi sub kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan/ Rencana Output	Jumlah	Sub Kegiatan/Realisasi Output	Jumlah	Ket
I	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian :	6	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, dengan rincian :	6	Melebihi Target
	Laporan hasil Pemantauan dan Pendampingan Penerapan SPM	6	Laporan hasil Pemantauan dan Pendampingan Penerapan SPM	6	Tercapai

Realisasi capaian kinerja Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah adalah 100% (Nilai Capaian kinerja 6 Perangkat Daerah dari target Tahun 2023 sebanyak 6 Perangkat Daerah) atau dengan Status Capaian **“Tercapai”**.

b) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Rencana dan realisasi sub kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan/ Rencana Output	Jumlah	Sub Kegiatan/Realisasi Output	Jumlah	Ket
II	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan rincian :	152	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan rincian :	158	Melebihi Target
	Laporan hasil Pendampingan PM SPIP	41	Laporan hasil Pendampingan PM SPIP	41	Tercapai
	Laporan hasil Pendampingan PMPRB	9	Laporan hasil Pendampingan PMPRB	21	Melebihi Target
	Laporan hasil Pendampingan ZI	8	Laporan hasil Pendampingan ZI	4	Tidak Tercapai
	Laporan hasil Pendampingan Evaluasi SAKIP	8	Laporan hasil pendampingan Evaluasi SAKIP	8	Tercapai
	Laporan Hasil PM KAPIP	1	Laporan Hasil PM KAPIP	1	Tercapai
	Laporan hasil Telaah SEJAWAT Internal	1	Laporan hasil Telaah SEJAWAT Internal	10	Melebihi Target
	Laporan hasil WBS	42	Laporan hasil WBS	0	Tidak Tercapai
	Laporan hasil Pendampingan IEPK	42	Laporan hasil Pendampingan IEPK	51	Melebihi Target

No	Sub Kegiatan/ Rencana Output	Jumlah	Sub Kegiatan/Realisasi Output	Jumlah	Ket
	-	-	Laporan hasil Pendampingan penilaian maturitas SPIP Asesor Pemda	2	Melebihi Target
	-	-	Laporan hasil Monitoring penyusunan road map RB 2023	1	Melebihi Target
	-	-	Laporan hasil Evaluasi ZI	8	Melebihi Target
	-	-	Laporan hasil Reviu dokumen PM IEPK	9	Melebihi Target
	-	-	Laporan hasil Reviu roadmap dan renaksi RB	2	Melebihi Target

Realisasi capaian kinerja Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi adalah 103,95% (Nilai Capaian kinerja 158 Laporan dari target Tahun 2023 sebanyak 152 Laporan) atau dengan Status Capaian **“Melebihi Target”**.

Terdapat output yang tidak tercapai yaitu Laporan hasil Pendampingan ZI yang tidak dilaksanakan karena amanat peraturan perundang-undangan dan Laporan hasil WBS tidak dilaksanakan karena belum memenuhi kriteria WBS. Namun demikian terdapat penambahan target kegiatan yang harus dilaksanakan karena amanat peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pendampingan penilaian maturitas SPIP Asesor Pemda;
- Monitoring penyusunan *roadmap* RB 2023;
- Evaluasi ZI;
- Reviu dokumen PM IEPK;
- Reviu *roadmap* dan renaksi RB.

- c) Koordinasi, monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Rencana dan realisasi sub kegiatan Koordinasi, monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan/ Rencana Output	Jumlah	Sub Kegiatan/Realisasi Output	Jumlah	Ket
III	Koordinasi, monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan rincian :	3	Koordinasi, monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan rincian :	3	Tercapai
	Laporan Hasil Monev/Pemantauan Renaksi MCP Korsupgah	1	Laporan Hasil Monev/Pemantauan Renaksi MCP Korsupgah	1	Tercapai
	Laporan Hasil Penilaian Mandiri Desa Antikorupsi	1	Laporan Hasil Penilaian Mandiri Desa Antikorupsi	1	Tercapai
	Laporan Hasil Operasionalisasi Satgas Saber Pungli	1	Laporan Hasil Operasionalisasi Satgas Saber Pungli	1	Tercapai

Realisasi capaian kinerja Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi adalah 100% (Nilai Capaian kinerja 1 Kegiatan dari target Tahun 2023 sebanyak 1 Kegiatan) atau dengan Status Capaian **“Tercapai”**.

d) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Rencana dan realisasi sub kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas adalah sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan/ Rencana Output	Jumlah	Sub Kegiatan/Realisasi Output	Jumlah	Ket
IV	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, dengan rincian :	165	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, dengan rincian :	165	Tercapai
	Laporan Monev LHKPN	41	Laporan Monev LHKPN	41	Tercapai
	Laporan Monev LHKAN	41	Laporan Monev LHKAN	41	Tercapai
	Laporan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	41	Laporan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	41	Tercapai
	Laporan UPG	42	Laporan UPG	42	Tercapai

Realisasi capaian kinerja Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas adalah 100% (Nilai Capaian kinerja 165 Perangkat Daerah dari target Tahun 2023 sebanyak 165 Perangkat Daerah) atau dengan Status Capaian **"Tercapai"**.

5) Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 8 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan. Rencana dan realisasi atas indikator sub kegiatan dalam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

No	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Ket.
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	Tercapai
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	Tercapai
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	Tercapai
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Tercapai
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Tercapai

No	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Ket.
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	Tercapai
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Tercapai
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	Tercapai
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	Melebihi Target
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Tercapai
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/bulan	Tidak Tercapai
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Tercapai
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	Tercapai

No	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Ket.
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan	Tercapai
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	100%	Terlayannya Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	100%	Tercapai
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Tercapai
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Tercapai
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Tercapai
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Tercapai
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	68 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	71 Orang	Melebihi Target
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	68 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110 Orang	Melebihi Target

No	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Ket.
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang	Tidak Tercapai
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Tercapai
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Tercapai
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Tercapai
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Tercapai
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Tercapai
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Tercapai
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Tercapai
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Tercapai
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Tercapai
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Tercapai

No	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Ket.
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	Tercapai
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Tercapai
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Jenis	Tercapai
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	Tercapai
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Tercapai
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	Tercapai
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Tercapai
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	Tercapai
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Jumlah laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	Tercapai
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan	6 Jenis	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan	6 Jenis	Tercapai

No	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Ket.
	Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah		Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Tercapai
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Tercapai
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Tercapai
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	83 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	Tidak Tercapai
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Tercapai
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	Tidak Tercapai

Realisasi capaian kinerja atas 8 Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah **"Tercapai"**. Namun untuk sub kegiatan, terdapat Sub Kegiatan yang tidak tercapai target kinerjanya yaitu:

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah 95,59% (Nilai capaian 65 Orang/Bulan dari target Kinerja 68 Orang/bulan). Tidak

tercapainya target kinerja sub kegiatan ini karena adanya 2 orang pegawai yang mutasi Jabatan keluar Inspektorat dan 1 Orang pegawai yang pensiun.

b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi kinerja Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah 90% (Nilai capaian 45 Orang dari target Kinerja 50 Orang). Tidak tercapainya target kinerja sub kegiatan ini karena bintek di bulan Desember tidak dilaksanakan karena menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.

c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi kinerja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah 98,79% (Nilai capaian 82 Unit dari target Kinerja 83 Unit). Tidak tercapainya target kinerja sub kegiatan ini karena 1 kali pemeliharaan Jaringan PABD tidak dilaksanakan karena menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.

d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Realisasi kinerja Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 96,29% (Nilai capaian 26 Unit dari target Kinerja 27 Unit). Tidak tercapainya target kinerja sub kegiatan ini karena 1 kali pemeliharaan Genset tidak dilaksanakan karena menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah.

4. Analisis Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu

Target dan Capaian kinerja sasaran berdasarkan tahapan dalam Renstra Inspektorat Tahun 2022-2023 seperti tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 13
Target dan Realisasi Capaian Indikator Sasaran Inspektorat
Tahun 2022 – 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal Tahun Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Target Capaian Tahun 2026
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Terwujudnya Peningkatan sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP	Tingkat maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada seluruh elemen minimal Level 3	3,023	3,075	3,014	3,100	3,309	3,190
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,93	81,50	82,90	82,70	84,33	84,00

Sumber : Data olahan Inspektorat Kabupaten Purworejo

Berdasarkan tabel diatas Realisasi Capaian Indikator Sasaran Tahun 2023 dibandingkan tahun lalu (Tahun 2022) adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada seluruh elemen minimal Level 3 realisasinya 3,309 meningkat 9,7% dibandingkan dengan capaian 2022 sebesar 3,014.
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat realisasinya adalah 84,33 meningkat 1,7% dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar 82,90.

Seluruh Indikator Kinerja Sasaran menunjukkan tren meningkat dari tahun sebelumnya sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di Tahun 2022. Capaian ini tidak lepas dari peran serta seluruh pegawai dan stakeholder terkait. Hal ini juga menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Purworejo telah secara optimal memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga bisa berkinerja sesuai dengan target yang telah diperjanjikan/ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

5. Analisis Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Perbandingan Kinerja antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya (Tahun 2022) serta perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target Renstra Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Tahun 2022 – 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2021)	Kinerja Tahun 2022			Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja		Kategori Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian				
1	Terwujudnya Peningkatan sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP	Tingkat maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada seluruh elemen minimal level 3	3,023	3,075	3,014	98,01%	3,100	3,309	106,74%	3,190			
		Rumus IKU = Tingkat maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada seluruh elemen minimal level 3											
		Capaian Kinerja Tahun 2023										106,74%	O
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022										109,78%	Relevan
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022										108,90%	Efektif
		Capaian Kinerja s.d. 2023 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)										103,73%	O
		Capaian 2022 terhadap Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Sasaran											100,00%	O	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2021)	Kinerja Tahun 2022			Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,93%	81,50	82,90	101,72%	82,70	84,33	101,94%	84,00		
Rumus IKU = Indeks Kepuasan Masyarakat												
Capaian Kinerja Tahun 2022											101, 94%	O
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2023											101,72%	Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022											100,21%	Efektif
Capaian Kinerja s.d. 2022 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)											100,39%	O
		Capaian 2022 terhadap Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Sasaran											100%	O

6. Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

Realisasi capaian kinerja sasaran dengan target indikator “Tingkat maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada seluruh elemen minimal level 3” adalah 100% (3,309 dari target tingkat maturitas SPIP Tahun 2023 sebesar 3,100 dan 3,050 dari target level kapabilitas APIP Tahun 2023 level 3) atau dengan Status Capaian **“Tercapai”**.

Capaian indikator sasaran sebesar 100% ini didukung dengan bukti dukung berupa Surat Deputy Kepala BPKP RI Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 Tanggal 28 Desember 2023 perihal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 menyatakan bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi BPKP Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Purworejo adalah 3,309.

Sedangkan berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Jenjang Pertama Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Kabupaten Purworejo Nomor PE.09.03/LHP-44/PW12/6/2023 Tanggal 30 November 2023 menyatakan bahwa Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Purworejo adalah 3,050.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian nilai tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - (a) Terdapat kesadaran dan kepedulian di seluruh tingkatan jajaran manajemen dan staf akan pentingnya SPIP;
 - (b) Terdapat kesamaan persepsi atas tanggung jawab efektifitas pelaksanaan SPIP;
 - (c) Terdapat persamaan persepsi terkait SPIP yang merupakan sebuah kebutuhan organisasi;
 - (d) Pengembangan secara berkesinambungan pelaksanaan dan penilaian SPIP yang memudahkan pegawai dalam implementasinya.
- 2) Kapabilitas APIP
 - (a) Adanya komitmen pimpinan dalam mengawal upaya peningkatan Kapabilitas APIP;

- (b) Dukungan penuh anggaran dari Pemerintah Kabupaten Purworejo sesuai jumlah minimal anggaran pengawasan yang telah ditetapkan dalam pedoman penyusunan APBD.
- (c) Terjalannya kerjasama yang baik antara Inspektorat dengan BPKP dan AAIP dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP;
- (d) Peningkatan kompetensi APIP melalui diklat substansi pengawasan;
- (e) Terlaksananya consulting activities terhadap auditi secara masif yang dapat memberikan nilai tambah bagi auditi bukan hanya sekedar *assurance activities*.

Namun demikian masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya antara lain yaitu:

- a. SDM pengawasan/auditor masih kurang dari segi kuantitasnya yang belum memenuhi perhitungan formasi jabatan.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan SPIP di tingkat Perangkat Daerah antara lain belum tersusunnya manajemen risiko yang menyeluruh di Perangkat Daerah dan di Tingkat Strategis Pemerintah Daerah.
- c. Masih kurangnya ketepatan waktu Perangkat Daerah maupun Desa dalam menindaklanjuti temuan/rekomendasi perbaikan dari Inspektorat.
- d. Masih adanya anggapan dari sebagian pegawai terkait SPIP dan Kapabilitas APIP yang hanya sebatas pemenuhan dokumen saja.

Atas permasalahan dan hambatan yang ada, Inspektorat Kabupaten Purworejo telah mengupayakan solusi pemecahannya antara lain:

1. Mengupayakan/mengusulkan kepada pihak-pihak terkait pemenuhan SDM Pengawasan agar memenuhi dan sesuai dengan perhitungan formasi jabatan.
2. Melaksanakan pendampingan penyusunan manajemen risiko baik di tingkat perangkat daerah maupun pemerintah daerah serta melakukan evaluasi atas implementasi manajemen risiko pada seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwoerejo.

3. Secara berkala dan rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progres pemenuhan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan mengupayakan status Selesai 100%.
4. Internalisasi dan memberikan pemahaman melalui kegiatan pendampingan dan konsultasi pentingnya SPIP dan Kapabilitas APIP dan mengupayakan pengimplementasian bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen saja namun lebih pada substansi.

B. REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT

Pada Tahun Anggaran 2023 Inspektorat Kabupaten Purworejo mendapat alokasi anggaran untuk melaksanakan 3 program 14 kegiatan dan 39 sub kegiatan dalam rangka mencapai target sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan alokasi anggaran dalam Perubahan APBD TA 2023 maka Pagu Anggaran Inspektorat Kabupaten Purworejo adalah:

TOTAL ANGGARAN : Rp15.174.356.324,00

TOTAL REALISASI : Rp13.938.923.401,00

Dari total realisasi anggaran tersebut, terdapat beberapa sub kegiatan yang realisasi anggarannya kurang dari 95% dari total anggaran. Realisasi kinerja Keuangan/Anggaran dan analisis penyebab/permasalahan yang mengakibatkan realisasi keuangan kurang dari 95% sebagaimana tercantum dalam di bawah ini.

Tabel 15
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
A	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.991.228.524,00	11.471.467.386,00	95,67%	

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
a	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.753.800,00	47.955.900,00	94,49%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.352.300,00	20.398.450,00	95,53%	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.696.000,00	1.608.450,00	94,84%	Permasalahan: Terdapat sisa kontrak atas pengadaan belanja ATK. Solusi: -
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.466.600,00	2.423.150,00	98,24%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2.625.200,00	2.143.000,00	81,63%	Permasalahan: Terdapat anggaran makan minum yang tidak bisa direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.684.300,00	2.620.750,00	97,63%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.182.600,00	5.723.100,00	92,57%	Permasalahan: Terdapat anggaran makan minum yang tidak bisa direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.746.800,00	13.039.000,00	94,85%	Permasalahan: Terdapat sisa kontrak atas pengadaan belanja ATK. Solusi: -
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.410.796.574,00	9.069.119.344,00	96,37%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.396.010.074,00	9.054.718.944,00	96,37%	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.265.300,00	7.137.300,00	98,24%	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.057.200,00	3.958.200,00	97,56%	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.464.000,00	3.304.900,00	95,41%	-
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	5.634.600,00	5.353.475,00	95,01%	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.550.700,00	2.464.175,00	96,61%	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.083.900,00	2.889.300,00	93,69%	Permasalahan: Terdapat sisa kontrak atas pengadaan belanja ATK. Solusi: -
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.287.921.800,00	1.207.173.241,00	93,73%	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	119.469.000,00	118.218.280,00	98,95%	-

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.134.692.100,00	1.059.267.236,00	93,35%	Permasalahan: Terdapat anggaran Diklat Teknis dan Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Teknis yang tidak bisa direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16.601.600,00	13.430.600,00	80,90%	Permasalahan: Terdapat anggaran Honor Narasumber Sosialisasi dan Makan Minum Sosialisasi yang tidak bisa direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17.159.100,00	16.257.125,00	94,74%	Permasalahan: Terdapat sisa kontrak atas pengadaan belanja ATK. Solusi: -
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	345.523.900,00	319.475.912,00	92,46%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.720.100,00	14.651.200,00	99,53%	-

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.134.800,00	1.791.000,00	83,90%	Permasalahan: Terdapat sisa kontrak atas pengadaan belanja peralatan dan perlengkapan kantor. Solusi: -
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.853.000,00	11.258.702,00	94,99%	Permasalahan: Terdapat sisa kontrak atas pengadaan peralatan rumah tangga. Solusi: -
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.914.000,00	65.864.000,00	96,98%	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.070.000,00	33.812.300,00	91,21%	Permasalahan: Terdapat anggaran belanja fotocopi yang tidak bisa direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.796.000,00	2.781.000,00	99,46%	-
	Penyediaan Bahan/Material	20.087.900,00	19.841.200,00	98,77%	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.480.000,00	8.468.000,00	99,86%	-

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.465.800,00	142.419.860,00	88,75%	Permasalahan: Terdapat anggaran belanja Perjalanan Dinas Koordinasi yang tidak bisa direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16.202.300,00	14.967.750,00	92,38%	Permasalahan: Terdapat anggaran belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum pengelolaan Arsip yang tidak bisa direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.800.000,00	3.620.900,00	95,29%	-
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	217.539.700,00	198.270.000,00	91,14%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	173.575.600,00	159.450.000,00	91,86%	Permasalahan: Terdapat sisa kontrak atas pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya. Solusi: -

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.964.100,00	38.820.000,00	88,30%	Permasalahan: Terdapat sisa kontrak atas pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Solusi: -
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.917.900,00	142.141.895,00	91,75%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	650.000,00	212.500,00	32,69%	Permasalahan: Terdapat sisa anggaran belanja pengiriman dokumen yang tidak terealisasi karena hampir semua kegiatan surat menyurat dilakukan via aplikasi digital. Solusi: PPTK lebih cermat lagi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000,00	92.661.867,00	88,25%	Permasalahan: Terdapat sisa anggaran belanja listrik, air dan telepon yang tidak terealisasi karena kebijakan penghematan dalam penggunaan jasa komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik. Solusi: PPTK lebih cermat lagi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.267.900,00	49.267.528,00	99,999%	-
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	518.140.250,00	481.977.619,00	93,02%	

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.429.000,00	10.417.224,00	99,89%	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.664.000,00	31.683.857,00	60,16%	Permasalahan: Terdapat sisa anggaran belanja pemeliharaan kendaraan yang tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.118.000,00	45.148.700,00	83,43%	Permasalahan: Terdapat sisa anggaran belanja Pemeliharaan telepon/mesin PABX yang tidak terealisasi karena efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	377.495.250,00	376.150.838,00	99,64%	-

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.434.000,00	18.577.000,00	79,27%	Permasalahan: Terdapat sisa anggaran belanja pemeliharaan sarana prasarana kantor (pompa air dan genset) yang tidak terealisasi efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
II	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	1.820.466.300,00	1.380.074.250,00	75,81%	
a	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.465.235.800,00	1.135.673.538,00	77,51%	

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	227.720.500,00	176.224.650,00	77,39%	Permasalahan: - Terdapat sisa anggaran belanja ATK karena sisa kontrak - Belanja Perjalanan Dinas pemeriksaan ketaatan urusan rencana semula pemeriksaan berdasarkan program kegiatan tetapi terlaksana berdasarkan program prioritas. -Terdapat belanja Perjalanan Dinas Pemeriksaan BUMD yang sudah diperiksa BPK (bank purworejo) sehingga Inspektorat tidak melaksanakan pemeriksaan. - Terdapat Belanja Perjalanan Dinas yang tidak terealisasi karena efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	140.543.600,00	109.866.950,00	78,17%	Permasalahan: Terdapat Belanja Perjalanan Dinas Pemeriksaan Keuangan yang tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	Reviu Laporan Kinerja	34.894.000,00	34.871.700,00	99,94%	-

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Reviu Laporan Keuangan	100.982.300,00	100.300.400,00	99,32%	-
	Pengawasan Desa	278.566.100,00	186.414.782,00	66,92%	Permasalahan: Terdapat Belanja Perjalanan Dinas Pemeriksaan Desa untuk Konsinyering LHP yang tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	Kerjasama Pengawasan Internal	35.893.300,00	12.009.439,00	33,46%	Permasalahan: Terdapat Belanja Makan minum rapat, Honor Harasumber dan Perjalanan dinas terkait kerjasama pengawasan yang tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	646.636.000,00	515.985.617,00	79,80%	Permasalahan: Terdapat Belanja Makan Minum Rapat Rakorwas, Honor Tim MO, Narasumber untuk Konsinyering Rapat MO yang tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
b	Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	355.230.500,00	244.400.712,00	68,80%	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	82.529.400,00	29.469.900,00	35,71%	Permasalahan: - Terdapat Honor Saksi Yang tidak terealisasi karena tidak terdapat Pengiriman Personil sebagai Saksi Ahli di Persidangan - Terdapat Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Cetak dan Perjalanan Dinas yang tidak terealisasi karena efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	272.701.100,00	214.930.812,00	78,82%	Permasalahan: Terdapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk PDTT dan Koordinasi Luar Daerah dalam Rangka PDTT, yang tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	1.362.661.500,00	1.087.626.765,00	79,82%	
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	109.792.400,00	69.171.000,00	63,00%	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	66.409.800,00	59.718.100,00	89,92%	Permasalahan: Terdapat Makan Minum Rapat dan Perjalanan Dinas Dalam dalam Rangka Penyusunan PKPT, yang tidak terealisasi karena efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	43.382.600,00	9.452.900,00	21,79%	Permasalahan: Terdapat Honor Narasumber, makan minum Rapat dan Perjalanan Dinas Konsinyering Penyusunan SOP, yang tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
b	Pendampingan dan Asistensi	1.252.869.100,00	1.018.455.765,00	81,29%	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	13.907.000,00	11.709.000,00	84,20%	Permasalahan: - Terdapat sisa anggaran belanja ATK karena sisa kontrak - Terdapat belanja Cetak dan Perjalanan Dinas yang tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	247.214.400,00	215.446.732,00	87,15%	Permasalahan: - Terdapat sisa anggaran belanja ATK karena sisa kontrak - Terdapat belanja Makan Minum Rapat KAPIP dan Sosialisasi WBS, Honorarium Narasumber SPIP Perjalanan Dinas Pendampingan MR yang tidak terealisasi karena efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	809.894.300,00	662.188.676,00	81,76%	Permasalahan: - Terdapat sisa anggaran belanja ATK karena sisa kontrak - Terdapat belanja Fotocopy Saber Pungli, Honorarium Saber Pungli, Makan Minum Rapat Saber, Jamuan Tamu Saber, Publikasi Saber Perjalanan Dinas Saber yang tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	181.853.400,00	129.111.357,00	71,00%	Permasalahan: - Terdapat sisa anggaran belanja ATK karena sisa kontrak - Terdapat belanja Cetak Banner UPG, Makan Minum Rapat UPG, Sosialisasi UPG Perjalanan Dinas Koordinasi UPG yang tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	JUMLAH	15.174.356.324,00	13.939.168.401,00	91,86%	

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Inspektorat Kabupaten Purworejo berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga dimaksudkan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government*.

Dari uraian dan analisis serta evaluasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama, tersirat secara jelas bahwa Inspektorat Kabupaten Purworejo telah berusaha mewujudkan capaian kinerja sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dan bertekad membangun sebuah sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih akuntabel. Berdasarkan penilaian atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2023, tingkat capaian sasaran sebesar 100,00%.

Keberhasilan tersebut disebabkan antara lain :

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - a. Terdapat kesadaran dan kepedulian di seluruh tingkatan jajaran manajemen dan staf akan pentingnya SPIP;
 - b. Terdapat kesamaan persepsi atas tanggung jawab efektifitas pelaksanaan SPIP;
 - c. Terdapat persamaan persepsi terkait SPIP yang merupakan sebuah kebutuhan organisasi;
 - d. Pengembangan secara berkesinambungan pelaksanaan dan penilaian SPIP yang memudahkan pegawai dalam implementasinya.
2. Kapabilitas APIP
 - a. Adanya komitmen pimpinan dalam mengawal upaya peningkatan Kapabilitas APIP;
 - b. Dukungan penuh anggaran dari Pemerintah Kabupaten Purworejo sesuai jumlah minimal anggaran pengawasan yang telah ditetapkan dalam pedoman penyusunan APBD.
 - c. Terjalannya kerjasama yang baik antara Inspektorat dengan BPKP dan AAIPi dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP;

- d. Peningkatan kompetensi APIP melalui diklat substansi pengawasan;
- e. Terlaksananya consulting activities terhadap auditi secara masif yang dapat memberikan nilai tambah bagi auditi bukan hanya sekedar *assurance activities*.

Namun demikian masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya antara lain yaitu:

1. SDM pengawasan/auditor masih kurang dari segi kuantitasnya yang belum memenuhi perhitungan formasi jabatan.
2. Belum optimalnya pelaksanaan SPIP di tingkat Perangkat Daerah antara lain belum tersusunnya manajemen risiko yang menyeluruh di Perangkat Daerah dan di Tingkat Strategis Pemerintah Daerah.
3. Masih kurangnya ketepatan waktu Perangkat Daerah maupun Desa dalam menindaklanjuti temuan/rekomendasi perbaikan dari Inspektorat.
4. Masih adanya anggapan dari sebagian pegawai terkait SPIP dan Kapabilitas APIP yang hanya sebatas pemenuhan dokumen saja.

Atas permasalahan/hambatan yang ada, Inspektorat Kabupaten Purworejo telah mengupayakan solusi pemecahannya antara lain:

1. Mengupayakan/mengusulkan kepada pihak-pihak terkait pemenuhan SDM Pengawasan agar memenuhi dan sesuai dengan perhitungan formasi jabatan.
2. Melaksanakan pendampingan penyusunan manajemen risiko baik di tingkat perangkat daerah maupun pemerintah daerah serta melakukan evaluasi atas implementasi manajemen risiko pada seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwoerejo.
3. Secara berkala dan rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap progres pemenuhan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan mengupayakan status Selesai 100%.
4. Internalisasi dan memberikan pemahaman melalui kegiatan pendampingan dan konsultasi pentingnya SPIP dan Kapabilitas APIP dan mengupayakan pengimplementasian bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen saja namun lebih pada substansi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban, juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Purworejo, 31 Januari 2024

Plt. INSPEKTUR

The image shows a circular official stamp of the Inspektorat Kabupaten Purworejo. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO" around the top and "INSPEKTORAT PURWOREJO" around the bottom. In the center is a blue ink signature, which appears to be "R. Achmad Kurniawan Kadir".

Drs. R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR, MPA
Pembina Utama Muda
NIP. 19670512 199203 1 001

DAFTAR REFERENSI

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo, Tugas Pokok, dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Purworejo;
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023;
11. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/1/2023 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kabupaten Purworejo Tahun 2023;

12. Keputusan Inspektur Kabupaten Purworejo Nomor 160.18/17/2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
13. Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026.
14. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
15. Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023;
16. Surat Deputi Kepala BPKP RI Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 Tanggal 28 Desember 2023 perihal Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023;
17. Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Jenjang Pertama Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Kabupaten Purworejo Nomor PE.09.03/LHP-44/PW12/6/2023 Tanggal 30 November 2023;
18. Dokumen Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023;
19. Laporan Hasil Realisasi Fisik dan Keuangan Inspektorat Kabupaten Purworejo Bulan Desember Tahun 2023.
20. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 *print out* FMIS dan Manual Excel.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

INSPEKTORAT

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 59 Purworejo Kode Pos 54113

Telepon (0275) 321603, Faksimile (0275) 321603

Laman inspektorat.purworejokab.go.id, Pos-el inspektorat@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 100.3.3.5/04/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO

INSPEKTUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Purworejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 9 Seri A Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Seri A Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Purworejo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Purworejo, adalah:
1. Mengumpulkan dan mengolah bahan materi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
 2. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
 3. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Inspektur Kabupaten Purworejo.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 8 Januari 2024

Pt. INSPEKTUR


Drs. R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR, MPA

Pembina Utama Muda
NIP. 19670512 199203 1 001

Lampiran : Keputusan Inspektur
Kabupaten Purworejo
Nomor : 100.3.3.5/04/2024
Tanggal : 8 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO**

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Drs. R. Achmad Kurniawan K, MPA NIP. 19670512 199203 1 001	Plt. Inspektur	Penanggung jawab
2.	Eny Mungawanah, SS NIP. 19731120 199803 2 006	Sekretaris	Ketua
3.	Adhimas Galih Hasmono, SE NIP. 19851202 201001 1 011	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Sekretaris
4.	Andito Sidiq Swastomo, ST, MURP NIP. 19800823 201001 1 008	Kasubag Perencanaan	Anggota
5.	Teguh Satria, S.STP NIP. 19950421 201708 1 002	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Anggota
6	Rakhman Adi, SE NIP. 19780909 201001 1 014	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Anggota
7.	Amin Rois W., A.Md., SM NIP. 19880907 201101 1 007	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
8.	Intan Wulandari, A.Md NIP. 19820409 201001 2 016	Pengelola Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD	Anggota
9.	Septi Dema Sutanti, SE. MM NIP. 19850903 200902 2 004	Penata Laporan Keuangan	Anggota
10.	Paskalia Enjang Werdhiati, Amd NIP. 19870415 200903 2 004	Verifikator Keuangan	Anggota
11.	Amat Makfut NIP. 19680504 200906 1 002	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Anggota
12.	Aulia Widyasmara, SE, MM NIP. 19830503 201001 2 030	Analisis Perencana	Anggota
13.	Sri Handayani, S.IP NIP. 19820512 200902 2 006	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota


 Plt. INSPEKTUR
Drs. R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR, MPA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670512 199203 1 001

**TAHAPAN PENYUSUNAN LKjIP
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023**

No.	Agenda	Januari							
		2-5	9	10-12	15-19	22	23	24	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persiapan dan Penunjukan Tim								
2.	Rapat Koordinasi Tim								
3.	Pengumpulan Mater LKjIP								
4.	Penyusunan LKjIP								
5.	Pembahasan LKjIP dengan Tim								
6.	Finalisasi LKjIP								
7.	Konsultasi Hasil Akhir LKjIP								
8.	Pengiriman LKjIP								



 Plt. INSPEKTUR
Drs. R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR, MPA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670512 199203 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

INSPEKTORAT

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 59 Purworejo Kode Pos 54113

Telepon (0275) 321603, Faksimile (0275) 321603

Laman inspektorat.purworejokab.go.id, Pos-el inspektorat@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 100.3.3.5/22/2024

TENTANG

TIM EVALUASI

IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2023

INSPEKTUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui sejauh mana mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi, perlu dilaksanakan evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2023 dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

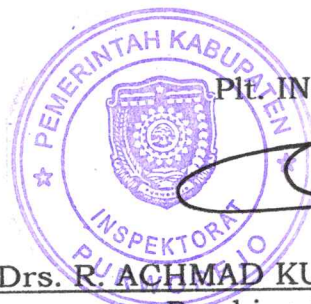
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 9 Seri A Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023, adalah:
1. Mengumpulkan dan melakukan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LHE);
 2. Menyusun hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
 3. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Inspektur Kabupaten Purworejo.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Januari 2024



Pt. INSPEKTUR

Drs. R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR, MPA

Pembina Utama Muda

NIP. 19670512 199203 1 001

Lampiran : Keputusan Inspektur
Kabupaten Purworejo
Nomor : 100.3.3.5/22/2024
Tanggal : 31 Januari 2024

**SUSUNAN TIM EVALUASI
IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023**

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Drs. R. Achmad Kurniawan K, MPA NIP. 19670512 199203 1 001	Plt. Inspektur	Penasihat
2.	Wahyu Mustiko Aji, SE. MM NIP. 19770217 199903 1 003	Inspektur Pembantu III	Penanggung jawab
3.	Dra. Rahaju Pudjiastuti, MM NIP. 19730316 199403 2 008	PPUPD Ahli Madya	Supervisor
4.	Yuni Setiyowati, SE NIP. 19740616 199703 2 005	PPUPD Ahli Muda	Ketua
5.	Yeti Rochayati, SIP, MAP NIP. 19740131 199803 2 005	PPUPD Ahli Muda	Anggota
6.	Siti Sundarti, SP. MM NIP. 19740923 201001 2 001	PPUPD Ahli Muda	Anggota


Plt. INSPEKTUR
Drs. R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR, MPA
Pembina Utama Muda
NIP. 19670512 199203 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

INSPEKTORAT

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 59 Purworejo Kode Pos 54113

Telepon (0275) 321603, Faksimile (0275) 321603

Laman inspektorat.purworejokab.go.id, Pos-el inspektorat@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR :100.3.3.5/23 /2024

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN 2023

INSPEKTUR,

- Menimbang : a. Bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Purworejo tentang Penetapan LKjIP pada Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 9 Seri A Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 29 Seri A Nomor 29);;

12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 29 Seri A Nomor 29);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Seri A Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023.
- KESATU :** Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Perencanaan Kinerja
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja
- BAB IV : Penutup
- KEDUA :** Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2023 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Januari 2024

Plt. INSPEKTUR



Drs. R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR, MPA
Pembina Utama Muda
NIP. 19670512 199203 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT
SKPD : 6-01.0-00.0-00.01 INSPEKTORAT
Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.01.000 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.01.000.000 INSPEKTORAT

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5	BELANJA DAERAH	15.174.356.324,00	13.938.923.401,00	91,86	15.944.153.670,00
5.1	BELANJA OPERASI	14.729.853.374,00	13.515.342.733,00	91,75	13.808.207.442,00
5.1.01	Belanja Pegawai	9.396.690.074,00	9.055.398.944,00	96,37	8.719.361.369,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.333.163.300,00	4.459.943.789,00	83,63	5.088.846.073,00
5.2	BELANJA MODAL	444.502.950,00	423.580.668,00	95,29	2.135.946.228,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	224.687.700,00	204.998.668,00	91,24	1.936.965.228,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	219.815.250,00	218.582.000,00	99,44	198.981.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(15.174.356.324,00)	(13.938.923.401,00)	0	(15.944.153.670,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(15.174.356.324,00)	(13.938.923.401,00)	0	(15.944.153.670,00)



LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Purworejo

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
A	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.991.228.524,00	11.471.467.386,00	95,67%	
a	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.753.800,00	47.955.900,00	94,49%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.352.300,00	20.398.450,00	95,53%	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.696.000,00	1.608.450,00	94,84%	Permasalahan: Terdapat sisa kontrak atas pengadaan belanja ATK. Solusi: -
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.466.600,00	2.423.150,00	98,24%	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2.625.200,00	2.143.000,00	81,63%	Permasalahan: Terdapat anggaran makan minum yang tidak bisa direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.684.300,00	2.620.750,00	97,63%	

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.182.600,00	5.723.100,00	92,57%	Permasalahan: Terdapat anggaran makan minum yang tidak bisa direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.746.800,00	13.039.000,00	94,85%	Permasalahan: Terdapat sisa kontrak atas pengadaan belanja ATK. Solusi: -
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.410.796.574,00	9.069.119.344,00	96,37%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.396.010.074,00	9.054.718.944,00	96,37%	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.265.300,00	7.137.300,00	98,24%	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.057.200,00	3.958.200,00	97,56%	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.464.000,00	3.304.900,00	95,41%	-
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	5.634.600,00	5.353.475,00	95,01%	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.550.700,00	2.464.175,00	96,61%	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.083.900,00	2.889.300,00	93,69%	Permasalahan: Terdapat sisa kontrak atas pengadaan belanja ATK. Solusi: -

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.287.921.800,00	1.207.173.241,00	93,73%	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	119.469.000,00	118.218.280,00	98,95%	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.134.692.100,00	1.059.267.236,00	93,35%	Permasalahan: Terdapat anggaran Diklat Teknis dan Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Teknis yang tidak bisa direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	16.601.600,00	13.430.600,00	80,90%	Permasalahan: Terdapat anggaran Honor Narasumber Sosialisasi dan Makan Minum Sosialisasi yang tidak bisa direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	17.159.100,00	16.257.125,00	94,74%	Permasalahan: Terdapat sisa kontrak atas pengadaan belanja ATK. Solusi: -
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	345.523.900,00	319.475.912,00	92,46%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.720.100,00	14.651.200,00	99,53%	-

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.134.800,00	1.791.000,00	83,90%	Permasalahan: Terdapat sisa kontrak atas pengadaan belanja peralatan dan perlengkapan kantor. Solusi: -
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.853.000,00	11.258.702,00	94,99%	Permasalahan: Terdapat sisa kontrak atas pengadaan peralatan rumah tangga. Solusi: -
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.914.000,00	65.864.000,00	96,98%	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.070.000,00	33.812.300,00	91,21%	Permasalahan: Terdapat anggaran belanja fotocopi yang tidak bisa direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.796.000,00	2.781.000,00	99,46%	-
	Penyediaan Bahan/Material	20.087.900,00	19.841.200,00	98,77%	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.480.000,00	8.468.000,00	99,86%	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.465.800,00	142.419.860,00	88,75%	Permasalahan: Terdapat anggaran belanja Perjalanan Dinas Koordinasi yang tidak bisa direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16.202.300,00	14.967.750,00	92,38%	Permasalahan: Terdapat anggaran belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum pengelolaan Arsip yang tidak bisa direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.800.000,00	3.620.900,00	95,29%	-
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	217.539.700,00	198.270.000,00	91,14%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	173.575.600,00	159.450.000,00	91,86%	Permasalahan: Terdapat sisa kontrak atas pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya. Solusi: -
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.964.100,00	38.820.000,00	88,30%	Permasalahan: Terdapat sisa kontrak atas pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Solusi: -
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.917.900,00	142.141.895,00	91,75%	

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	650.000,00	212.500,00	32,69%	Permasalahan: Terdapat sisa anggaran belanja pengiriman dokumen yang tidak terealisasi karena hampir semua kegiatan surat menyurat dilakukan via aplikasi digital. Solusi: PPTK lebih cermat lagi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000,00	92.661.867,00	88,25%	Permasalahan: Terdapat sisa anggaran belanja listrik, air dan telepon yang tidak terealisasi karena kebijakan penghematan dalam penggunaan jasa komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik. Solusi: PPTK lebih cermat lagi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.267.900,00	49.267.528,00	99,999%	-
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	518.140.250,00	481.977.619,00	93,02%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.429.000,00	10.417.224,00	99,89%	-

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.664.000,00	31.683.857,00	60,16%	Permasalahan: Terdapat sisa anggaran belanja pemeliharaan kendaraan yang tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.118.000,00	45.148.700,00	83,43%	Permasalahan: Terdapat sisa anggaran belanja Pemeliharaan telepon/mesin PABX yang tidak terealisasi karena efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	377.495.250,00	376.150.838,00	99,64%	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.434.000,00	18.577.000,00	79,27%	Permasalahan: Terdapat sisa anggaran belanja pemeliharaan sarana prasarana kantor (pompa air dan genset) yang tidak terealisasi efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
II	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	1.820.466.300,00	1.380.074.250,00	75,81%	
a	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.465.235.800,00	1.135.673.538,00	77,51%	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	227.720.500,00	176.224.650,00	77,39%	<p>Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat sisa anggaran belanja ATK karena sisa kontrak - Belanja Perjalanan Dinas pemeriksaan ketaatan urusan rencana semula pemeriksaan berdasarkan program kegiatan tetapi terlaksana berdasarkan program prioritas. - Terdapat belanja Perjalanan Dinas Pemeriksaan BUMD yang sudah diperiksa BPK (bank purworejo) sehingga Inspektorat tidak melaksanakan pemeriksaan. - Terdapat Belanja Perjalanan Dinas yang tidak terealisasi karena efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. <p>Solusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	140.543.600,00	109.866.950,00	78,17%	Permasalahan: Terdapat Belanja Perjalanan Dinas Pemeriksaan Keuangan yang tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	Reviu Laporan Kinerja	34.894.000,00	34.871.700,00	99,94%	-
	Reviu Laporan Keuangan	100.982.300,00	100.300.400,00	99,32%	-
	Pengawasan Desa	278.566.100,00	186.414.782,00	66,92%	Permasalahan: Terdapat Belanja Perjalanan Dinas Pemeriksaan Desa untuk Konsinyering LHP yang tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	Kerjasama Pengawasan Internal	35.893.300,00	12.009.439,00	33,46%	Permasalahan: Terdapat Belanja Makan minum rapat, Honor Harasumber dan Perjalanan dinas terkait kerjasama pengawasan yang tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	646.636.000,00	515.985.617,00	79,80%	Permasalahan: Terdapat Belanja Makan Minum Rapat Rakorwas, Honor Tim MO, Narasumber untuk Konsinyering Rapat MO yang tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
b	Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	355.230.500,00	244.400.712,00	68,80%	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	82.529.400,00	29.469.900,00	35,71%	Permasalahan: - Terdapat Honor Saksi Yang tidak terealisasi karena tidak terdapat Pengiriman Personil sebagai Saksi Ahli di Persidangan - Terdapat Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Cetak dan Perjalanan Dinas yang tidak terealisasi karena efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	272.701.100,00	214.930.812,00	78,82%	Permasalahan: Terdapat Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk PDTT dan Koordinasi Luar Daerah dalam Rangka PDTT, yang tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	1.362.661.500,00	1.087.626.765,00	79,82%	
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	109.792.400,00	69.171.000,00	63,00%	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	66.409.800,00	59.718.100,00	89,92%	Permasalahan: Terdapat Makan Minum Rapat dan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan PKPT, yang tidak terealisasi karena efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	43.382.600,00	9.452.900,00	21,79%	Permasalahan: Terdapat Honor Narasumber, makan minum Rapat dan Perjalanan Dinas Konsinyering Penyusunan SOP, yang tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
b	Pendampingan dan Asistensi	1.252.869.100,00	1.018.455.765,00	81,29%	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	13.907.000,00	11.709.000,00	84,20%	Permasalahan: - Terdapat sisa anggaran belanja ATK karena sisa kontrak - Terdapat belanja Cetak dan Perjalanan Dinas yang tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	247.214.400,00	215.446.732,00	87,15%	Permasalahan: - Terdapat sisa anggaran belanja ATK karena sisa kontrak - Terdapat belanja Makan Minum Rapat KAPIP dan Sosialisasi WBS, Honorarium Narasumber SPIP Perjalanan Dinas Pendampingan MR yang tidak terealisasi karena efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	809.894.300,00	662.188.676,00	81,76%	Permasalahan: - Terdapat sisa anggaran belanja ATK karena sisa kontrak - Terdapat belanja Fotocopy Saber Pungli, Honorarium Saber Pungli, Makan Minum Rapat Saber, Jamuan Tamu Saber, Publikasi Saber Perjalanan Dinas Saber yang tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -

No	Uraian Usulan, Program dan Kegiatan	Anggaran		Capaian	Keterangan
		Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	181.853.400,00	129.111.357,00	71,00%	Permasalahan: - Terdapat sisa anggaran belanja ATK karena sisa kontrak - Terdapat belanja Cetak Banner UPG, Makan Minum Rapat UPG, Sosialisasi UPG Perjalanan Dinas Koordinasi UPG yang tidak terealisasi karena adanya efisiensi anggaran menyesuaikan Kemampuan Keuangan Daerah akibat tidak tercapainya realisasi Penerimaan Daerah. Solusi: -
	JUMLAH	15.174.356.324,00	13.939.168.401,00	91,86%	

Plt. INSPEKTUR



Drs. R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR, MPA
Pembina Utama Muda
NIP. 19670512 199203 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
INSPEKTORAT

Jl. Mayjend Sutoyo Nomor 59 Purworejo Kode Pos 54111

Telp. (0275) 321603 Fax (0275) 321603

E-mail: inspektorat@purworejokab.go.id Website: inspektorat.purworejokab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 160.18 / 17 / 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021-2026

INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
 10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 82 Seri D Nomor 29);
 11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021 -2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 48 Seri E Nomor 44).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 6 Januari 2023

INSPEKTUR,

Drs. R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR, MPA

Rebama Utama Muda
NIP. 19670512 199203 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR : 160-18/17/2023
 TENTANG :
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP	Tingkat Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP pada seluruh Eleman minimal Level 3	Level Tingkat Maturitas Sistem Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP dari BPKP	Inspektorat
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai indek kepuasan terhadap pelayanan yang dilakukan Inspektorat	Hasil Survei Kepuasan Mayarakat terhadap mitra kerja pengawasan dan internal	Inspektorat

INSPEKTUR

 Drs. R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR, MPA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670512 199203 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR :
TENTANG :
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Terwujudnya Peningkatan Sistem Pengendalian Intern dan Penguatan Kapabilitas APIP	Tingkat Maturitas SPIP Kapabilitas APIP pada seluruh Eleman minimal Level 3	3,023	3,075	3,100	3,130	3,170	3,190	3,190
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	80,93	81,50	82,70	83,00	83,50	84,00	84,00



INSPEKTUR

Drs. R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR, MPA
Pembina Utama Muda
NIP. 19670512 199203 1 001

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREJO
SEMESTER II TAHUN 2023

NILAI IKM	NAMA LAYANAN : PELAYANAN PUBLIK
84,33	RESPONDEN JUMLAH : 100 orang JENIS : L = 64 orang KELAMIN P = 36 orang PENDIDIKAN : SLTP = 1 orang SLTA = 19 orang DII = 1 orang DIII = 10 orang S1 = 48 orang S2 = 21 orang Periode survey = 1 November s/d 22 Desember 2023

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Purworejo, 29 Desember 2023



Drs. R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR, MPA
Pembina Utama Muda
NIP. 19670512 198803 1 001

LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
S/D BULAN DESEMBER 2023
INSPEKTORAT

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	6.01 .01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH		11.812.692.524	178.536.000			11.991.228.524					11.537.457.238	453.771.286	100	10.724.007.959	747.459.427	11.471.467.386	95,67	100	0	
1	6.01 .01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		50.753.800				50.753.800					47.955.900	2.797.900	100	3.990.000	43.965.900	47.955.900	94,49	100	0	
	6.01 .01. 2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		21.352.300				21.352.300					20.398.450	953.850	100	3.990.000	16.408.450	20.398.450	95,53	100	0	
			Paket Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.775.000				4.775.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	3.990.000	785.000	100	3.990.000		3.990.000	83,56	100	0	
			Paket Penyediaan Makan Minum Rapat Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	13.440.500				13.440.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	13.419.700	20.800	100		13.419.700	13.419.700	99,85	100	0	
			Paket Penyediaan ATK Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan	1.936.800				1.936.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	1.789.000	147.800	100		1.789.000	1.789.000	92,37	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsf er	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Paket Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	1.200.000				1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	1.199.750	250	100		1.199.750	1.199.750	99,98	100	0	
	6.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		1.696.000				1.696.000					1.608.450	87.550	100		1.608.450	1.608.450	94,84	100	0	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		0	0			0	0	0	0	
			Pengadaan ATK Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	772.800				772.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	685.400	87.400	100		685.400	685.400	88,69	100	0	
			Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	222.000				222.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	222.000	0	100		222.000	222.000	100	100	0	
			Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	701.200				701.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	701.050	150	100		701.050	701.050	99,98	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsfer	Jumlah								Keuangan						
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	6.01 .01. 2.01 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.466.600				2.466.600					2.423.150	43.450	100		2.423.150	2.423.150	98,24	100	0	
			Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	964.000				964.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	964.000	0	100		964.000	964.000	100	100	0	
			Pengadaan ATK Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.093.400				1.093.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	1.050.000	43.400	100		1.050.000	1.050.000	96,03	100	0	
			Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	409.200				409.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	409.150	50	100		409.150	409.150	99,99	100	0	
	6.01 .01. 2.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		2.625.200				2.625.200					2.143.000	482.200	100		2.143.000	2.143.000	81,63	100	0	
			Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	444.000				444.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		444.000	100			0	0	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsf er	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pengadaan ATK Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.011.200				1.011.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	973.000	38.200	100		973.000	973.000	96,22	100	0	
			Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.170.000				1.170.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purcha sing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	1.170.000	0	100		1.170.000	1.170.000	100	100	0	
	6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		2.684.300				2.684.300					2.620.750	63.550	100		2.620.750	2.620.750	97,63	100	0	
			Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.044.800				1.044.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purcha sing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	1.044.750	50	100		1.044.750	1.044.750	100	100	0	
			Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	723.000				723.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purcha sing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	723.000	0	100		723.000	723.000	100	100	0	
			Pengadaan ATK Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	916.500				916.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	853.000	63.500	100		853.000	853.000	93,07	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsf er	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	6.01 .01. 2.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6.182.600				6.182.600					5.723.100	459.500	100		5.723.100	5.723.100	92,57	100	0	
			Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.820.000				4.820.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	4.456.300	363.700	100		4.456.300	4.456.300	92,45	100	0	
			Pengadaan ATK Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	960.200				960.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	864.600	95.600	100		864.600	864.600	90,04	100	0	
			Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	402.400				402.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	402.200	200	100		402.200	402.200	99,95	100	0	
	6.01 .01. 2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		13.746.800				13.746.800					13.039.000	707.800	100		13.039.000	13.039.000	94,85	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyediaan Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.338.000				4.338.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	4.279.300	58.700	100		4.279.300	4.279.300	98,65	100	0	
			Pengadaan ATK Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.888.800				7.888.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	7.240.200	648.600	100		7.240.200	7.240.200	91,78	100	0	
			Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.520.000				1.520.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	1.519.500	500	100		1.519.500	1.519.500	99,97	100	0	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		0	0			0	0	0	0	
8	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.410.796.574				9.410.796.574					9.069.119.344	341.677.230	100	9.054.718.944	14.400.400	9.069.119.344	96,37	100	0	
	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9.396.010.074				9.396.010.074					9.054.718.944	341.291.130	100	9.054.718.944		9.054.718.944	96,37	100	0	
			Gaji dan Tunjangan ASN	9.396.010.074				9.396.010.074	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	9.054.718.944	341.291.130	100	9.054.718.944		9.054.718.944	96,37	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsf er	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	6.01 .01. 2.02 .03	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD		7.265.300				7.265.300					7.137.300	128.000	100		7.137.300	7.137.300	98,24	100	0	
			Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	4.338.000				4.338.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	4.321.400	16.600	100		4.321.400	4.321.400	99,62	100	0	
			Pengadaan ATK Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi keuangan SKPD	2.327.300				2.327.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	2.216.400	110.900	100		2.216.400	2.216.400	95,23	100	0	
			Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	600.000				600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	599.500	500	100		599.500	599.500	99,92	100	0	
	6.01 .01. 2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4.057.200				4.057.200					3.958.200	99.000	100		3.958.200	3.958.200	97,56	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsf er	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.928.000				1.928.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	1.910.200	17.800	100		1.910.200	1.910.200	99,08	100	0	
			Pengadaan ATK Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.166.200				1.166.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	1.088.600	77.600	100		1.088.600	1.088.600	93,35	100	0	
			Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	963.000				963.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	959.400	3.600	100		959.400	959.400	99,63	100	0	
	6.01.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		3.464.000				3.464.000					3.304.900	159.100	100		3.304.900	3.304.900	95,41	100	0	
			Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.892.000				2.892.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	2.880.900	11.100	100		2.880.900	2.880.900	99,62	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	572.000				572.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	424.000	148.000	100		424.000	424.000	74,13	100	0	
12	6.01. .01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		5.634.600				5.634.600					5.353.475	281.125	100		5.353.475	5.353.475	95,01	100	0	
	6.01. .01. 2.03 .01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2.550.700				2.550.700					2.464.175	86.525	100		2.464.175	2.464.175	96,61	100	0	
			Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	500.000				500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	491.575	8.425	100		491.575	491.575	98,32	100	0	
			Pengadaan ATK Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.086.700				1.086.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	1.027.600	59.100	100		1.027.600	1.027.600	94,56	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi						Ket	
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsf er	Jumlah								Keuangan					Fisik %		Devi asi Fisik (%)
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	964.000				964.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	945.000	19.000	100		945.000	945.000	98,03	100	0		
	6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		3.083.900				3.083.900					2.889.300	194.600	100		2.889.300	2.889.300	93,69	100	0		
			Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.205.000				1.205.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	1.164.000	41.000	100		1.164.000	1.164.000	96,6	100	0		
			Pengadaan ATK Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.348.500				1.348.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	1.197.600	150.900	100		1.197.600	1.197.600	88,81	100	0		
			Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	530.400				530.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	527.700	2.700	100		527.700	527.700	99,49	100	0		
14	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.287.921.800				1.287.921.800					1.207.962.341	79.959.459	100	1.139.582.991	67.590.250	1.207.173.241	93,73	100	0		
	6.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		119.469.000				119.469.000					118.218.280	1.250.720	100	104.403.980	13.814.300	118.218.280	98,95	100	0		

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devl asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsf er	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Paket Swakelola Sub Keg Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	105.192.000				105.192.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	104.403.980	788.020	100	104.403.980		104.403.980	99,25	100	0	
			Paket Cetak Sub Keg Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.662.800				1.662.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	1.592.700	70.100	100		1.592.700	1.592.700	95,78	100	0	
			Paket Makan Minum Sub Keg Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.952.400				3.952.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	3.561.000	391.400	100		3.561.000	3.561.000	90,1	100	0	
			Paket ATK Sub Keg. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8.661.800				8.661.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	8.660.600	1.200	100		8.660.600	8.660.600	99,99	100	0	
	6.01 .01. 2.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		1.134.692.100				1.134.692.100					1.059.267.236	75.424.864	100	1.020.999.886	38.267.350	1.059.267.236	93,35	100	0	
			Paket ATK Sub Keg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.430.300				6.430.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	6.261.500	168.800	100		6.261.500	6.261.500	97,37	100	0	
			paket Swakelola Sub Keg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.095.166.000				1.095.166.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	1.020.999.886	74.166.114	100	1.020.999.886		1.020.999.886	93,23	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Paket Makan Minum Sub Keg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.437.000				25.437.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	25.400.400	36.600	100		25.400.400	25.400.400	99,86	100	0	
			Paket Cetak SUB Keg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.658.800				7.658.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	6.605.450	1.053.350	100		6.605.450	6.605.450	86,25	100	0	
	6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		16.601.600				16.601.600					13.430.600	3.171.000	100	7.653.000	5.777.600	13.430.600	80,9	100	0	
			Paket Swakelola Sub Keg sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.798.000				10.798.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	7.653.000	3.145.000	100	7.653.000		7.653.000	70,87	100	0	
			Paket Makan Minum Sub Keg Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.379.000				5.379.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	5.374.200	4.800	100		5.374.200	5.374.200	99,91	100	0	
			Paket Cetak Sub Keg Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	122.000				122.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	119.000	3.000	100		119.000	119.000	97,54	100	0	
			Paket ATK Sub Keg Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	302.600				302.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	284.400	18.200	100		284.400	284.400	93,99	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsf er	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	6.01 .01. 2.05 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan		17.159.100				17.159.100					17.046.225	112.875	100	6.526.125	9.731.000	16.257.125	94,74	100	0	
			Paket Cetak Sub Keg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	260.800				260.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	260.800	0	100		260.700	260.700	99,96	100	0	
			Paket ATK Sub Keg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	3.252.300				3.252.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	3.252.300	0	100		2.463.300	2.463.300	75,74	100	0	
			Paket Makan Minum Rapat Sub Keg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	7.116.000				7.116.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	7.007.000	109.000	100		7.007.000	7.007.000	98,47	100	0	
			Paket Swakelola Sub Keg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	6.530.000				6.530.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	6.526.125	3.875	100	6.526.125		6.526.125	99,94	100	0	
18	6.01 .01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		345.523.900				345.523.900					345.523.900	0	100	116.358.510	203.117.402	319.475.912	92,46	100	0	
	6.01 .01. 2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor		14.720.100				14.720.100					14.720.100	0	100		14.651.200	14.651.200	99,53	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devl asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	14.720.100				14.720.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	14.720.100	0	100		14.651.200	14.651.200	99,53	100	0	
	6.01 .01. 2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2.134.800				2.134.800					2.134.800	0	100		1.791.000	1.791.000	83,9	100	0	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	889.000				889.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	889.000	0	100		568.000	568.000	63,89	100	0	
			Paket ATK Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	1.245.800				1.245.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	1.245.800	0	100		1.223.000	1.223.000	98,17	100	0	
	6.01 .01. 2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		11.853.000				11.853.000					11.853.000	0	100		11.258.702	11.258.702	94,99	100	0	
			Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.853.000				11.853.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	11.853.000	0	100		11.258.702	11.258.702	94,99	100	0	
	6.01 .01. 2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		67.914.000				67.914.000					67.914.000	0	100		65.864.000	65.864.000	96,98	100	0	
			Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.914.000				67.914.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	67.914.000	0	100		65.864.000	65.864.000	96,98	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	6.01 .01. 2.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		37.070.000				37.070.000					37.070.000	0	100		33.812.300	33.812.300	91,21	100	0	
			Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.070.000				37.070.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	37.070.000	0	100		33.812.300	33.812.300	91,21	100	0	
	6.01 .01. 2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		2.796.000				2.796.000					2.796.000	0	100	2.781.000		2.781.000	99,46	100	0	
			Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	2.796.000				2.796.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	2.796.000	0	100	2.781.000		2.781.000	99,46	100	0	
	6.01 .01. 2.06 .07	Penyediaan Bahan/Materi al		20.087.900				20.087.900					20.087.900	0	100		19.841.200	19.841.200	98,77	100	0	
			Paket Cetak Sub Keg Penyediaan Material					0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023		0	0			0	0	0	0	
			Paket Penyediaan Bahan/Material	20.087.900				20.087.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	20.087.900	0	100		19.841.200	19.841.200	98,77	100	0	
	6.01 .01. 2.06 .08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		8.480.000				8.480.000					8.480.000	0	100		8.468.000	8.468.000	99,86	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyediaan Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Paket Fasilitas Kunjungan Tamu	8.480.000				8.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	8.480.000	0	100		8.468.000	8.468.000	99,86	100	0	
	6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		160.465.800				160.465.800					160.465.800	0	100	113.277.510	29.142.350	142.419.860	88,75	100	0	
			Paket Makan Minum Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.867.800				28.867.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	28.867.800	0	100		28.376.600	28.376.600	98,3	100	0	
			Paket Swakelola Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.830.000				130.830.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	130.830.000	0	100	113.277.510		113.277.510	86,58	100	0	
			Paket Cetak Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	768.000				768.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	768.000	0	100		765.750	765.750	99,71	100	0	
	6.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		16.202.300				16.202.300					16.202.300	0	100	300.000	14.667.750	14.967.750	92,38	100	0	
			Paket Swakelola Sub Keg Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.477.500				1.477.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	1.477.500	0	100	300.000		300.000	20,3	100	0	
			Paket Makan Minum Rapat Sub keg Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.058.500				3.058.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	3.058.500	0	100		3.047.700	3.047.700	99,65	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsf er	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Paket Cetak Sub Keg. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	760.000				760.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	760.000	0	100		722.500	722.500	95,07	100	0	
			Paket ATK Sub Keg Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.906.300				10.906.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	10.906.300	0	100		10.897.550	10.897.550	99,92	100	0	
	6.01 .01. 2.06 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		3.800.000				3.800.000					3.800.000	0	100		3.620.900	3.620.900	95,29	100	0	
			Paket Cetak Sub Keg Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	426.000				426.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	426.000	0	100		424.500	424.500	99,65	100	0	
			Paket Makan Minum Sub Keg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.374.000				3.374.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	3.374.000	0	100		3.196.400	3.196.400	94,74	100	0	
29	6.01 .01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		39.003.700	178.536.000			217.539.700					198.690.000	18.849.700	100	1.780.000	196.490.000	198.270.000	91,14	100	0	
	6.01 .01. 2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.520.000	172.055.600			173.575.600					159.870.000	13.705.600	100	1.100.000	158.350.000	159.450.000	91,86	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsf er	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pengadaan Komputer		136.101.600			136.101.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng	CV. MEGA TEKNI K	02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	126.000.000	10.101.600	100		126.000.000	126.000.000	92,58	100	0	
			Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023		0	0			0	0	0	0	
			Pengadaan Peralatan Personal Komputer Lainnya		12.552.600			12.552.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng	CV. MEGA TEKNI K	02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	11.400.000	1.152.600	100		11.400.000	11.400.000	90,82	100	0	
			Pengadaan Peralatan Personal Komputer		23.401.400			23.401.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng	CV. MEGA TEKNI K	02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	20.950.000	2.451.400	100	680.000	20.950.000	21.630.000	92,43	100	0	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.520.000				1.520.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	1.520.000	0	100	420.000		420.000	27,63	100	0	
			Pengadaan Mebel					0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023		0	0			0	0	0	0	
6.01.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		37.483.700	6.480.400			43.964.100					38.820.000	5.144.100	100	680.000	38.140.000	38.820.000	88,3	100	0	
			Pengadaan Alat Pendingin Ruang	36.803.700				36.803.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng	CV. MEGA TEKNI K	02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	35.700.000	1.103.700	100		35.700.000	35.700.000	97	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsf er	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran		6.480.400			6.480.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	2.440.000	4.040.400	100		2.440.000	2.440.000	37,65	100	0	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	680.000				680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	680.000	0	100	680.000		680.000	100	100	0	
31	6.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		154.917.900				154.917.900					154.917.900	0	100	142.141.895		142.141.895	91,75	100	0	
	6.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		650.000				650.000					650.000	0	100	212.500		212.500	32,69	100	0	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	650.000				650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	650.000	0	100	212.500		212.500	32,69	100	0	
	6.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		105.000.000				105.000.000					105.000.000	0	100	92.661.867		92.661.867	88,25	100	0	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000				105.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	105.000.000	0	100	92.661.867		92.661.867	88,25	100	0	
	6.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		49.267.900				49.267.900					49.267.900	0	100	49.267.528		49.267.528	100	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsf er	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.267.900				49.267.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	49.267.900	0	100	49.267.528		49.267.528	100	100	0	
34	6.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		518.140.250				518.140.250					507.934.378	10.205.872	100	265.435.619	216.542.000	481.977.619	93,02	100	0	
	6.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		10.429.000				10.429.000					10.429.000	0	100	10.417.224		10.417.224	99,89	100	0	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		10.429.000				10.429.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	10.429.000	0	100	10.417.224		10.417.224	99,89	100	0	
	6.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		52.664.000				52.664.000					52.664.000	0	100	31.683.857		31.683.857	60,16	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga- daan	Penye- dia Jasa	Tanggal Pelaksa- naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar- get Fisi- k (%)	Realisasi					Devi- asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu- ga	Tra- nsfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Roda4 (empat)	41.716.000				41.716.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel- ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	41.716.000	0	100	24.427.857		24.427.857	58,56	100	0	
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Roda2 (dua)	10.948.000				10.948.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel- ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	10.948.000	0	100	7.256.000		7.256.000	66,28	100	0	
	6.01 .01. 2.09 .05	Pemeliharaan Mebel						0						0				0	0	0	0	
			Pemeliharaan Mebel					0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel- ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023		0	0			0	0	0	0	
	6.01 .01. 2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		54.118.000				54.118.000					54.118.000	0	100	45.148.700		45.148.700	83,43	100	0	
			Pemeliharaan Jaringan Internet	7.792.000				7.792.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel- ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	7.792.000	0	100	2.400.000		2.400.000	30,8	100	0	
			Pemeliharaan Personal Komputer	24.718.000				24.718.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel- ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	24.718.000	0	100	24.715.700		24.715.700	99,99	100	0	
			Pemeliharaan mesin absensi	370.000				370.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel- ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	370.000	0	100	355.000		355.000	95,95	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Penga- naan	Penye- dia- an Jasa	Tanggal Pelaksa- naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar- get Fisi- k (%)	Realisasi					Devi- asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu- ga	Tra- nsfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pemeliharaan Alat studio sound system	1.595.000				1.595.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel- ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	1.595.000	0	100	1.590.000		1.590.000	99,69	100	0	
			Pemeliharaan alat komunikasi telepon - pesawat PABX	3.443.000				3.443.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel- ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	3.443.000	0	100			0	0	100	0	
			Pemeliharaan kamera SLR/tustel digital					0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel- ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023		0	0			0	0	0	0	
			Pemeliharaan Printer	12.600.000				12.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel- ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	12.600.000	0	100	12.488.000		12.488.000	99,11	100	0	
			Pemeliharaan Slide Projector	3.600.000				3.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel- ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	3.600.000	0	100	3.600.000		3.600.000	100	100	0	
	6.01. 01. 2.09 .09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		377.495.250				377.495.250					367.289.378	10.205.872	100	159.608.838	216.542.000	376.150.838	99,64	100	0	
			Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Sub Kegiatan Pemeliharaan/Re- habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.040.000				2.040.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel- ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	2.040.000	0	100	2.040.000		2.040.000	100	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-BangunanGedung Kantor	157.680.000				157.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	148.707.378	8.972.622	100	157.568.838		157.568.838	99,93	100	0	
			Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Inspektorat	7.919.100				7.919.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	CV. KEKAN CAN SEJATI	02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	7.908.000	11.100	100		7.908.000	7.908.000	99,86	100	0	
			Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Inspektorat	11.878.650				11.878.650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	CV. SEROJA CONSULTANT	02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	11.863.000	15.650	100		11.863.000	11.863.000	99,87	100	0	
			Rehabilitasi bangunan gedung kantor Inspektorat	197.977.500				197.977.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung	CV. CITRATRIDIYA	02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	196.771.000	1.206.500	100		196.771.000	196.771.000	99,39	100	0	
6.01.01.2.09.10		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		23.434.000				23.434.000					23.434.000	0	100	18.577.000		18.577.000	79,27	100	0	
			Pemeliharaan alat besar electrik generating set	8.597.000				8.597.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	8.597.000	0	100	4.132.000		4.132.000	48,06	100	0	
			Pemeliharaan alat pendingin AC split	13.900.000				13.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	13.900.000	0	100	13.845.000		13.845.000	99,6	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsf er	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pemeliharaan Televisi LED	624.000				624.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	624.000	0	100	600.000		600.000	96,15	100	0	
			Pemeliharaan Pompa Air	313.000				313.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	313.000	0	100			0	0	100	0	
	6.01 .02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		1.820.466.300				1.820.466.300					1.820.466.300	0	100	1.171.454.750	208.374.500	1.379.829.250	75,8	100	0	
40	6.01 .02. 2.01	Penyelenggar aan Pengawasan Internal		1.465.235.800				1.465.235.800					1.465.235.800	0	100	955.413.088	180.140.450	1.135.553.538	77,5	100	0	
	6.01 .02. 2.01 .01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		227.720.500				227.720.500					227.720.500	0	100	135.178.000	41.046.650	176.224.650	77,39	100	0	
			Paket Makan Minum Rapat Sub Keg Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	18.108.500				18.108.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	18.108.500	0	100		17.719.200	17.719.200	97,85	100	0	
			Paket Swakelola Sub Keg Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	185.355.000				185.355.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	185.355.000	0	100	135.178.000		135.178.000	72,93	100	0	
			Paket Cetak Sub Keg Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3.600.000				3.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	3.600.000	0	100		3.599.750	3.599.750	99,99	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Paket ATK Sub Keg Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	20.657.000				20.657.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng		01-Feb- 2023 s/d 31- Des- 2023	20.657.000	0	100		19.727.700	19.727.700	95,5	100	0	
	6.01 .02. 2.01 .02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		140.543.600				140.543.600					140.543.600	0	100	88.105.000	21.641.950	109.746.950	78,09	100	0	
			Paket Swakelola Sub Keg Pengawsan Keuangan Pemerintah Daerah	117.405.000				117.405.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	117.405.000	0	100	88.105.000		88.105.000	75,04	100	0	
			Paket Makan Minum Sub Keg Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3.063.200				3.063.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e-Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	3.063.200	0	100		2.670.000	2.670.000	87,16	100	0	
			Paket Cetak Sub Keg Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	4.079.600				4.079.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e-Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	4.079.600	0	100		2.977.600	2.977.600	72,99	100	0	
			Paket ATK Sub Keg Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15.995.800				15.995.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	15.995.800	0	100		15.994.350	15.994.350	99,99	100	0	
	6.01 .02. 2.01 .03	Reviu Laporan Kinerja		34.894.000				34.894.000					34.894.000	0	100	31.141.400	3.730.300	34.871.700	99,94	100	0	
			Paket Makan Minum Sub Keg Reviu Laporan Kinerja	2.247.000				2.247.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e-Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	2.247.000	0	100		2.243.500	2.243.500	99,84	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsf er	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Paket Swakelola Sub Keg Reviu Laporan Kinerja	31.160.000				31.160.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	31.160.000	0	100	31.141.400		31.141.400	99,94	100	0	
			Paket Cetak Sub Keg Reviu Laporan Kinerja	1.487.000				1.487.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	1.487.000	0	100		1.486.800	1.486.800	99,99	100	0	
	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan		100.982.300				100.982.300					100.982.300	0	100	95.615.000	4.685.400	100.300.400	99,32	100	0	
			Paket Swakelola Sub Keg Reviu Laporan Keruangan	96.280.000				96.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	96.280.000	0	100	95.615.000		95.615.000	99,31	100	0	
			Paket Makan Minum Sub Keg. Reviu Laporan Keuangan	3.501.000				3.501.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	3.501.000	0	100		3.490.300	3.490.300	99,69	100	0	
			Paket Cetak Sub Keg Reviu Laporan Keuangan	1.110.000				1.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	1.110.000	0	100		1.110.000	1.110.000	100	100	0	
			Paket ATK Sub Keg Reviu Laporan Keuangan	91.300				91.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	91.300	0	100		85.100	85.100	93,21	100	0	
	6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa		278.566.100				278.566.100					278.566.100	0	100	165.072.132	21.342.650	186.414.782	66,92	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Paket Makan Minum Sub Keg Pengawasan Desa	2.538.500				2.538.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	2.538.500	0	100		2.526.800	2.526.800	99,54	100	0	
			Paket ATK Sub keg Pengawasan Dea	12.955.400				12.955.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	12.955.400	0	100		12.862.750	12.862.750	99,28	100	0	
			Paket Cetak Sub Keg Pengawasan Desa	6.800.000				6.800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	6.800.000	0	100		5.273.100	5.273.100	77,55	100	0	
			Paket Swakelola Sub Keg Pengawasan Desa	255.592.200				255.592.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	255.592.200	0	100	165.072.132		165.072.132	64,58	100	0	
			Administrasi Pengadaan ATK Sub Keg Pengawasan Desa	680.000				680.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		30-Jan- 2023 s/d 30- Jan- 2023	680.000	0	100		680.000	680.000	100	100	0	
	6.01 .02. 2.01 .06	Kerja Sama Pengawasan Internal		35.893.300				35.893.300					35.893.300	0	100	10.144.239	1.865.200	12.009.439	33,46	100	0	
			Paket Swakelola Sub Keg Kerja Sama Pengawasan Internal	22.738.000				22.738.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	22.738.000	0	100	10.144.239		10.144.239	44,61	100	0	
			Paket makan minum rapat Sub Keg Kerja Sama Pengawasan Internal	11.765.200				11.765.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	11.765.200	0	100		1.205.000	1.205.000	10,24	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Paket Cetak Sub Keg Kerja Sama Pengawasan Internal	728.000				728.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	728.000	0	100			0	0	100	0	
			Paket ATK Sub Keg Kerja Sama Pengawasan Internal	662.100				662.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	662.100	0	100		660.200	660.200	99,71	100	0	
	6.01 .02. 2.01 .07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		646.636.000				646.636.000					646.636.000	0	100	430.157.317	85.828.300	515.985.617	79,8	100	0	
			Paket Swakelola Sub Keg Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	541.219.000				541.219.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	541.219.000	0	100	430.157.317		430.157.317	79,48	100	0	
			Paket Makan Minum Sub Keg Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	79.264.000				79.264.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	79.264.000	0	100		61.738.800	61.738.800	77,89	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsf er	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Paket ATK Sub Keg Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	11.456.000				11.456.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	11.456.000	0	100		11.371.200	11.371.200	99,26	100	0	
			Pake Cetak Sub Keg Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	14.697.000				14.697.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e-Purch sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	14.697.000	0	100		12.718.300	12.718.300	86,54	100	0	
47	6.01 .02. 2.02	Penyelenggar aan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		355.230.500				355.230.500					355.230.500	0	100	216.041.662	28.234.050	244.275.712	68,77	100	0	
	6.01 .02. 2.02 .01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daera h		82.529.400				82.529.400					82.529.400	0	100	17.291.500	12.178.400	29.469.900	35,71	100	0	
			Paket Swakelola Sub Keg. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	64.670.000				64.670.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	64.670.000	0	100	17.291.500		17.291.500	26,74	100	0	
			Paket Cetak Sub Keg Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2.406.800				2.406.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e-Purch sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	2.406.800	0	100		999.900	999.900	41,54	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Paket Makan Minum Sub Keg Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4.338.000				4.338.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	4.338.000	0	100		723.000	723.000	16,67	100	0	
			Paket ATK Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	11.114.600				11.114.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	11.114.600	0	100		10.455.500	10.455.500	94,07	100	0	
	6.01 .02. 2.02 .02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		272.701.100				272.701.100					272.701.100	0	100	198.750.162	16.055.650	214.805.812	78,77	100	0	
			Paket Swakelola Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	256.140.000				256.140.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	256.140.000	0	100	198.750.162		198.750.162	77,59	100	0	
			Paket Makan Minum Sub Keg Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.025.000				6.025.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	6.025.000	0	100		5.756.200	5.756.200	95,54	100	0	
			Paket Cetak Sub Keg Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	3.150.000				3.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	3.150.000	0	100		3.149.950	3.149.950	100	100	0	
			Paket ATK Sub Keg Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	7.386.100				7.386.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	7.386.100	0	100		7.149.500	7.149.500	96,8	100	0	
	6.01 .03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		1.362.661.500				1.362.661.500					1.362.661.500	0	100	895.712.615	191.914.150	1.087.626.765	79,82	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsf er	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
49	6.01 .03. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		109.792.400				109.792.400					109.792.400	0	100	37.245.500	31.925.500	69.171.000	63	100	0	
	6.01 .03. 2.01 .01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		66.409.800				66.409.800					66.409.800	0	100	36.068.000	23.650.100	59.718.100	89,92	100	0	
			Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1.650.400				1.650.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	1.650.400	0	100		1.340.200	1.340.200	81,2	100	0	
			Pengadaan ATK Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	8.959.400				8.959.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	8.959.400	0	100		8.420.600	8.420.600	93,99	100	0	
			Perjalanan Dinas sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	38.440.000				38.440.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	38.440.000	0	100	36.068.000		36.068.000	93,83	100	0	
			Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	14.460.000				14.460.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	14.460.000	0	100		10.989.300	10.989.300	76	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsf er	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Narasumber Sub Keg Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2.900.000				2.900.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		22-Sep- 2023 s/d 31- Des- 2023	2.900.000	0	100		2.900.000	2.900.000	100	100	0	
	6.01 .03. 2.01 .02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		43.382.600				43.382.600					43.382.600	0	100	1.177.500	8.275.400	9.452.900	21,79	100	0	
			Perjalanan Dinas sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	31.380.000				31.380.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	31.380.000	0	100	1.177.500		1.177.500	3,75	100	0	
			Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	7.712.000				7.712.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	7.712.000	0	100		6.008.600	6.008.600	77,91	100	0	
			Pengadaan ATK Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	2.061.800				2.061.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	2.061.800	0	100		1.838.100	1.838.100	89,15	100	0	
			Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	428.800				428.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	428.800	0	100		428.700	428.700	99,98	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsf er	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Honor narasumber Sub Keg Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1.800.000				1.800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		03-Okt- 2023 s/d 03- Okt- 2023	1.800.000	0	100			0	0	100	0	
51	6.01 .03. 2.02	Pendampingan dan Asistensi		1.252.869.100				1.252.869.100					1.252.869.100	0	100	858.467.115	159.988.650	1.018.455.765	81,29	100	0	
	6.01 .03. 2.02 .01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		13.907.000				13.907.000					13.907.000	0	100	8.640.000	3.069.000	11.709.000	84,2	100	0	
			Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					0	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		0	0			0	0	0	0	
			Pengadaan ATK Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3.262.000				3.262.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	3.262.000	0	100		3.069.000	3.069.000	94,08	100	0	
			Paket Cetak Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	800.000				800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	800.000	0	100			0	0	100	0	
			Perjalanan Dinas sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	9.845.000				9.845.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	9.845.000	0	100	8.640.000		8.640.000	87,76	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsf er	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	6.01 .03. 2.02 .02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		247.214.400				247.214.400					247.214.400	0	100	202.285.282	13.161.450	215.446.732	87,15	100	0	
			Perjalanan Dinas sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	218.155.000				218.155.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	218.155.000	0	100	196.785.282		196.785.282	90,2	100	0	
			Penyediaan Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sub kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	9.400.000				9.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	9.400.000	0	100	5.500.000		5.500.000	58,51	100	0	
			Pengadaan ATK Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	3.708.400				3.708.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	3.708.400	0	100		3.448.800	3.448.800	93	100	0	
			Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	12.666.200				12.666.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	12.666.200	0	100		6.428.000	6.428.000	50,75	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsf er	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	3.284.800				3.284.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	3.284.800	0	100		3.284.650	3.284.650	100	100	0	
	6.01 .03. 2.02 .03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantas an Korupsi		809.894.300				809.894.300					809.894.300	0	100	581.536.676	80.652.000	662.188.676	81,76	100	0	
			Pengadaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5.300.000				5.300.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	5.300.000	0	100			0	0	100	0	
			Pengadaan ATK Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10.520.300				10.520.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pengad aan Langsu ng		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	10.520.300	0	100		9.788.900	9.788.900	93,05	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	18.283.200				18.283.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	e- Purcha sing		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	18.283.200	0	100		15.420.000	15.420.000	84,34	100	0	
			Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, bangunan terbuka, taman dan hotel sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4.588.800				4.588.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	4.588.800	0	100	4.588.800		4.588.800	100	100	0	
			Perjalanan Dinas sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	435.819.000				435.819.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Swakel ola Tipe 1		02-Jan- 2023 s/d 31- Des- 2023	435.819.000	0	100	347.951.876		347.951.876	79,84	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsf er	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Fasilitasi Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Saber Pungli sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	238.400.000				238.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	238.400.000	0	100	206.400.000		206.400.000	86,58	100	0	
			Sewa Alat Musik sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		0	0			0	0	0	0	
			Penyediaan Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20.500.000				20.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	20.500.000	0	100	8.300.000		8.300.000	40,49	100	0	
			Penyediaan hadiah lomba Hakordia					0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		0	0			0	0	0	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tra nsfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	156.000				156.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	156.000	0	100	156.000		156.000	100	100	0	
			Penyediaan Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		0	0			0	0	0	0	
			Penyediaan Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20.194.200				20.194.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	20.194.200	0	100	14.140.000		14.140.000	70,02	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metod e Penga daan	Penye dia Jasa	Tanggal Pelaksa naan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Tar get Fisi k (%)	Realisasi					Devi asi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terdu ga	Tran sfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	56.132.800				56.132.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	56.132.800	0	100		55.443.100	55.443.100	98,77	100	0	
	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		181.853.400				181.853.400					181.853.400	0	100	66.005.157	63.106.200	129.111.357	71	100	0	
			Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	11.725.200				11.725.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	11.725.200	0	100		4.338.800	4.338.800	37	100	0	
			Perjalanan Dinas sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	97.834.000				97.834.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	97.834.000	0	100	66.005.157		66.005.157	67,47	100	0	
			Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	49.432.500				49.432.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	49.432.500	0	100		36.407.400	36.407.400	73,65	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyediaan Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
																Keuangan				Fisik %		
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Pengadaan ATK Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2.931.700				2.931.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	2.931.700	0	100		2.750.000	2.750.000	93,8	100	0	
			Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sub kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	19.930.000				19.930.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	19.930.000	0	100		19.610.000	19.610.000	98,39	100	0	
			Jumlah	14.995.820.324	178.536.000			15.174.356.324					14.720.585.038	453.771.286	100	12.791.175.324	1.147.748.077	13.938.923.401	91,86	100	0	

Purworejo, 4 Januari 2024

Plt. INSPEKTUR
Kabupaten Purworejo



Dr. RACHMAD KURNIAWAN KADIR, MPA
NIP. 196705121992031001